Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

BPPP
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

RENCANA STRATEGI BISNIS

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGI BISNIS

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

Jakarta, 16 Januari 2023

Mengetahui
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil, Ph.D.

Kepala Balai
Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategi Bisnis (RSB) UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Pusat Asesmen Pendidikan dapat diselesaikan. Dokumen RSB ini merupakan dokumen persyaratan untuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) instansi pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

RSB merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku kementerian teknis periode tahun 2020-2024. RSB menjadi alat ukur pencapaian tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

RSB BPPP Tahun 2022-2027 disusun secara partisipatif, dibahas, dan dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak. RSB BPPP merupakan dokumen perencanaan bisnis tahap pertama sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penetapan RSB BPPP Tahun 2022-2027. Kami menyadari bahwa RSB BPPP yang telah kami susun masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan RSB BPPP.

Pada akhirnya besar harapan kami, semoga dokumen RSB BPPP Tahun 2022-2027 dapat dijadikan pedoman dan arah pengembangan untuk mencapai tujuan dan membawa BPPP menjadi satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi lebih baik lagi.

Atas perhatian dan kerja sama dari pihak-pihak yang membantu penyusunan dokumen RSB ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2022

Kepala Balai,

Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed.

NIP 19790823200312202

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK vii
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 1
B. Visi dan Misi BPPP 4
C. Sistematika Penyusunan RSB 5
BAB II ANALISIS DAN STRATEGI 6
A. Evaluasi Kinerja BPPP Periode 2019-2022 6
B. Analisis SWOT 13
C. Inisiatif Strategis 14
BAB III RENCANA STRATEGI BISNIS 5 (LIMA) TAHUN 16
A. Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 16
B. Strategi Bisnis BPPP 17
C. Proyeksi Kuantitas Layanan yang Akan Dijalankan BPPP dalam 5 Tahun ke Depan 18
D. Proyeksi Pendapatan 19
E. Proyeksi Anggaran 5 Tahun ke Depan 20
F. Proyeksi SDM 5 Tahun ke Depan 21
BAB IV PENUTUP 23
LAMPIRAN I 24
A. Evaluasi Kinerja LTMPT dan BPPP Periode 2019-2022 24
B. Analisis SWOT 32
C. Inisiatif Strategis 38
LAMPIRAN II 44
A. Strategi Bisnis BPPP 44
B. Proyeksi Kuantitas Layanan yang Akan Dijalankan BPPP 5 Tahun ke Depan 48
C. Proyeksi Belanja 5 Tahun ke Depan 49
D. Proyeksi SDM 5 Tahun ke Depan 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3
Tabel 2. Daya Tampung PTN, Peserta Pendaftar, dan Peserta Diterima Periode 2019-20207
Tabel 3. Laporan Keuangan LTMPT dan BPPP Periode Tahun 2019-2022 10
Tabel 4. Jumlah SDM Eksisting Tahun 2022 11
Tabel 5. Aset Tetap 13
Tabel 6. Rincian Rencana Strategis Selama 5 Tahun 17
Tabel 7. Proyeksi Target Jumlah Peserta Layanan Pengujian 5 Tahun ke Depan 18
Tabel 8. Pendapatan dan Belanja Anggaran 5 Tahun Periode 2023-2027 21
Tabel 9. Proyeksi Jumlah SDM BPPP 5 Tahun ke Depan Periode Tahun 2023-2027 22
Tabel 10. Daya Tampung, Pendaftar, dan Peserta yang Diterima SNMPTN dan SBMPTN pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 24
Tabel 11. Daya Tampung, Pendaftar, dan Peserta yang Diterima SNMPTN dan SBMPTN Setiap Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2022 24
Tabel 12. Diversifikasi Layanan Non-Seleksi Perguruan Tinggi Negeri 28
Tabel 13. Evaluasi Kinerja Keuangan Periode 2019-2022 29
Tabel 14. Evaluasi SDM Tahun 2022 30
Tabel 15. Estimasi Neraca Tahun 2022 31
Tabel 16. Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022 32
Tabel 17. Hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI) 32
Tabel 18. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 36
Tabel 19. Tujuan Strategis BPPP 38
Tabel 20. Sasaran Strategis BPPP 39
Tabel 21. Kegiatan Strategis BPPP 39
Tabel 22. Jabaran Kegiatan Strategis BPPP 40
Tabel 23. Memperluas Akses Layanan Pengujian Pendidikan 44
Tabel 24. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengujian Pendidikan 45
Tabel 25. Meningkatkan Kuantitas Layanan Pengujian Pendidikan 46
Tabel 26. Meningkatkan Relevansi dan Keberdayagunaan Data serta Informasi Hasil Pengujian Pendidikan 47
Tabel 27. Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan 47
Tabel 28. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016-2021 48
Tabel 29. Pertumbuhan Jumlah Pendaftar Ujian Seleksi Masuk PTN Periode 2019-2022 .. 48
Tabel 30. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023 49
Tabel 31. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024 50

Tabel 32. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2025 51
Tabel 33. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2026 52
Tabel 34. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2027 53
Tabel 35. Rekap Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023-2027 54
Tabel 36. Estimasi Laporan Operasional Anggaran 5 Tahun Periode 2023-2027 55
Tabel 37. Estimasi Neraca 5 Tahun Periode 2023-2027 56
Tabel 38. Proyeksi SDM 5 Tahun Periode 2023-2027 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi BPPP dalam Matriks *Grand Strategy* 13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Proyeksi PNBP BLU 5 Tahun Periode 2023-2027 19
Grafik 2. Daya Tampung SNMPTN dan SBMPTN pada Tahun 2020, 2021, dan 2022..... 24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengelola Pengujian Pendidikan yang selanjutnya disebut BPPP adalah satuan kerja di bawah Pusat Asesmen Pendidikan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diharapkan dapat mendorong percepatan perwujudan visi, misi, dan sasaran strategis pembangunan pendidikan dalam ranah pengujian untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Satuan kerja ini lahir sebagai salah satu wujud transformasi kelembagaan dalam lingkungan organisasi Kemendikbudristek yang diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola seleksi masuk perguruan tinggi yang sebelumnya diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Transformasi ini didasari pada cita-cita organisasi yaitu mewujudkan pelayanan yang berkualitas, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berfokus pada perencanaan dan peningkatan layanan pengelolaan pengujian (tes) dalam bidang pendidikan melalui perluasan akses bagi pihak yang memerlukan.

Selain mengelola seleksi masuk perguruan tinggi, BPPP juga melanjutkan peran Pusat Asesmen Pendidikan dalam melakukan pelayanan pengujian kepada satuan kerja lain di internal Kemendikbudristek maupun instansi/kementerian lain. Dengan demikian tanggung jawab BPPP dalam memberikan layanan pengujian yang kredibel dan akuntabel semakin besar. Selain itu, tentu saja ekspektasi pengguna layanan dalam hal ini masyarakat pun terus berkembang. Karenanya, volume dan kompleksitas pekerjaan yang akan dihadapi oleh satuan kerja ini menuntut suatu proses bisnis yang kompatibel.

Capaian kinerja BPPP dalam rentang waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang mencakup 4 (empat) indikator utama yaitu: 1) kinerja layanan, 2) kinerja keuangan, 3) kinerja sarana dan prasarana, dan 4) kinerja sumber daya manusia. Terlepas dari beberapa kendala khusus, keempat indikator tersebut menunjukkan perkembangan, pertumbuhan dan kenaikan performa dari LTMPT yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja BPPP ke depan. Masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan secara umum sebagai kondisi performa awal dari BPPP yang pada umumnya merupakan produk yang terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Sebagai contoh, bidang layanan yang mencakup seleksi penerimaan mahasiswa baru dan pengujian akademik maupun non akademik. Kedua aspek ini secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan peningkatan di antaranya berkaitan dengan jumlah pendaftar, daya tampung, dan persepsi masyarakat. Demikian juga berkaitan dengan keuangan yang menunjukkan efisiensi pada ranah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus peningkatan partisipasi pembiayaan dari masyarakat.

Performa sarana dan prasarana juga menunjukkan kapasitas yang cukup baik dilihat dari kecukupan, kualitas, termasuk pengembangan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan internal maupun tuntutan eksternal. Sementara untuk sumber daya manusia saat ini sejumlah 18 orang yang mencakup Kepala BPPP, Kasubbag Umum, fungsional, dan pelaksana. Selain itu, untuk mendukung kinerja di bidang seleksi penerimaan mahasiswa baru, maka BPPP didukung oleh 7 (tujuh) orang selaku tim pengelola data seleksi perguruan tinggi (sebelumnya adalah anggota tim seleksi di LTMPT).

Meskipun secara umum, performa LTMPT yang merupakan aset awal dari BPPP cukup baik sebagaimana diuraikan di atas, namun beberapa kendala masih menjadi tantangan yang bersifat laten yang berpotensi dihadapi oleh BPPP ke depan. Hal ini didasarkan pada hasil audit kinerja LTMPT 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan kendala-kendala yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas khususnya pada tata kelola anggaran. Secara kelembagaan, pengelolaan pengujian yang bersifat nasional melalui lembaga non-struktural yang tidak permanen akan sulit melakukan pengembangan koerganisasian dan kinerja yang pada akhirnya berujung pada masalah akuntabilitas.

Berdasarkan gambaran singkat tersebut, maka alternatif yang paling strategis adalah transformasi kelembagaan BPPP menjadi BLU. Dengan format BLU, organisasi ini akan lebih lincah dan dinamis dalam menghadapi dan mengelola tantangan tersebut. Mengingat bahwa satuan kerja ini menangani urusan pemerintahan dalam bidang layanan masyarakat yang sangat vital, dengan menggunakan jalur penganggaran melalui APBN dan dana masyarakat maka diperlukan fleksibilitas sekaligus akuntabilitas yang tinggi. Kemendikbudristek melalui satuan kerja BPPP memiliki tanggung jawab konstitusional maupun tanggung jawab moral untuk merespon ekspektasi dan partisipasi pendanaan dari masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Inilah yang menjadi landasan rasional dan empirik dari urgensi BPPP menjadi BLU.

Mengacu pada sasaran strategis Kemendikbudristek, BPPP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk periode 5 tahun ke depan. Pertama, perluasan akses layanan pengujian pendidikan. Diawali pada tahun 2022 menargetkan penerimaan mahasiswa baru sebanyak 1,4 juta peserta hingga pada akhir tahun 2027 BPPP menargetkan penerimaan mahasiswa baru sebanyak 1,6 juta. Angka tersebut belum mencakup diversifikasi layanan meliputi pengujian akademik dan pengujian non akademik.

Kedua, peningkatan kualitas layanan pengujian pendidikan. Terkait dengan hal ini, BPPP menyiapkan penyusunan desain pengujian (tes) di bidang pendidikan yang terstandar untuk mengukur dan menilai pencapaiannya. Sejalan dengan itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, secara berkala dan berkelanjutan BPPP melakukan sosialisasi, pelatihan,

monitoring, dan evaluasi yang disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar (POS), serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga dan *stakeholder* lainnya.

Ketiga, peningkatan kuantitas layanan pengujian pendidikan. Hal ini ditempuh melalui pengembangan dan perluasan target sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dan sistem pengujian akademik dan non akademik. Melalui Permendikbud 48 tahun 2022, sasaran seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN diperluas tidak hanya untuk jenjang sarjana namun juga diploma. Perluasan target juga ditunjukkan dengan diversifikasi moda serta sarana pengujian sehingga mampu melayani beragam kondisi geografis di Indonesia serta beragam tingkat literasi digital.

Keempat, relevansi dan keberdayagunaan data serta informasi hasil pengujian pendidikan. Relevansi ini sangat penting sebagai umpan balik bagi masyarakat dalam mendayagunakan data serta informasi hasil pengujian untuk bahan perbaikan dan pengembangan layanan pendidikan. Untuk itu, BLU-BPPP akan mewadahi kebutuhan tersebut melalui forum-forum *workshop* atau bentuk-bentuk sosialisasi lainnya, serta beragam kajian untuk memastikan konstruk pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Kelima, pengembangan kemitraan atau kerja sama di bidang pengujian. Dalam format BLU, urusan kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan adalah bagian yang penting bagi BPPP. Untuk itu, BLU-BPPP menargetkan kerja sama ini dengan berbagai *stakeholder* pengguna layanan pengujian pendidikan.

Keenam, pengembangan tata kelola pengujian pendidikan. Dalam hal ini, BLU-BPPP telah menyiapkan Roadmap Reformasi Birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan yang secara ideal akan mewujudkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yang mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi aktual dari BPPP terhadap akumulasi dan interaksi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang teridentifikasi, yang secara rasional dapat dinyatakan bahwa satuan kerja ini layak melakukan strategi pengembangan atau dalam posisi strategi pertumbuhan. Lebih lanjut, satker BPPP memiliki landasan rasional yang kuat untuk melaksanakan tata kelola dalam format BLU. Lebih jauh dapat disimpulkan bahwa, hasil analisis SWOT dengan status progresif, atau di kuadran pertama pada titik (4.34, 3.01) menandakan bahwa satuan kerja ini memiliki prospek untuk terus bertumbuh dan meraih kemajuan secara maksimal khususnya dalam format BLU.

Dalam konteks BLU, tema besar yang memiliki relevansi dengan Sasaran Strategis Kemendikbudristek yaitu “Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengujian (Tes) yang Transparan

dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi". Untuk mewujudkan harapan yang tertuang dalam tema besar tersebut, maka hasil analisis SWOT telah menetapkan inisiatif strategis pengujian pendidikan mencakup: perluasan akses, kuantitas dan kualitas layanan, tata kelola dan relevansi serta keberdayagunaan data maupun informasi hasil pengujian pendidikan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 mengambil pijakan legal pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Amanat tersebut dikemas dalam visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Renstra Kemendikbudristek ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbudristek sebagai kementerian yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

A.1 Visi Kemendikbudristek

Berfokus pada amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan visi yaitu “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

A.2 Misi Kemendikbudristek

Visi Kemendikbudristek diwujudkan melalui pelaksanaan misi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;

2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi sebagaimana disebutkan pada butir 1 misi Kemendikbudristek tersebut, dibutuhkan sistem pengujian yang kredibel. Hal itu selaras dengan salah satu sasaran strategis Kemendikbudristek, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengujian adalah bagian dari perangkat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan. Selain itu, berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan mutu, terdapat dua poin penting yang erat kaitannya dengan sistem pengujian atau penilaian yaitu penjaminan mutu yang semakin kuat dan bermakna serta kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat. Penjaminan mutu yang kuat dan bermakna hanya mungkin terwujud jika ditopang dengan sistem pengujian yang baik. Demikian juga sistem pengujian yang terstandar akan menjadi dasar dalam mengembangkan kapasitas penggunaan bentuk-bentuk penilaian termasuk penilaian formatif dan portofolio.

Strategi percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan yang dilakukan Kemendikbudristek juga ditempuh melalui model sinergitas yaitu memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan merupakan salah satu komponen organik Kemendikbudristek yang dapat mendorong perwujudan model sinergitas tersebut melalui layanan sistem pengelolaan pengujian yang tersandar dan profesional.

A.3 Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Upaya perwujudan Visi Kemendikbudristek dilaksanakan melalui perumusan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan dengan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong. Adapun rumusan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebijakan dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No.	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Arah Kebijakan Kemendikbudristek
1	Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	• Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas. • Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.	• Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan. • Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	• Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter. • Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia. • Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.	• Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan • Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	• Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

B. Visi dan Misi BPPP

Pengembangan organisasi menjadi satuan kerja (UPT) didasari pada cita-cita organisasi yaitu mewujudkan pelayanan yang berkualitas, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berfokus pada perencanaan dan peningkatan layanan pengelolaan pengujian (tes) dalam bidang pendidikan melalui perluasan akses bagi pihak yang memerlukan. Cita-cita tersebut dapat direalisasikan melalui upaya pencapaian visi misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

B.1 Visi BPPP

Adapun visi BPPP adalah:

“Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas”.

Visi tersebut di atas merupakan wujud komitmen BPPP dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dengan menciptakan Pelajar Pancasila melalui pelaksanaan layanan pelaksanaan pengujian pendidikan secara objektif dengan menggunakan instrumen terstandar serta dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang pengujian dan evaluasi pendidikan.

B.2 Misi BPPP

Misi UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan meliputi:

a. Melaksanakan pengujian (tes) yang kredibel untuk uji kompetensi dan seleksi.
b. Mengembangkan sistem pengelolaan pengujian (tes) yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
c. Melakukan pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian (tes) secara objektif.
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengujian (tes) melalui pendidikan dan pelatihan.
e. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan.

B.3 Tugas dan Fungsi BPPP

Tugas BPPP adalah melaksanakan pengelolaan pengujian pendidikan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan;
c. Pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan;

d. Pengelolaan data dan informasi;
e. Pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g. Pelaksanaan urusan administrasi.

C. Sistematika Penyusunan RSB

RSB BPPP disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif
b. BAB I. Pendahuluan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.
c. BAB II. Analisis dan Strategi terdiri dari beberapa subbab yaitu: 2.1) Evaluasi Kinerja BPPP 2020-2022, 2.2) Analisis SWOT, dan 3) Inisiatif Strategis
d. BAB III. Rencana Strategi Bisnis 5 (Lima) Tahun terdiri dari: 3.1) Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan 3.2) Strategi Bisnis BPPP
e. BAB IV. Penutup

BAB II
ANALISIS DAN STRATEGI

A. Evaluasi Kinerja BPPP Periode 2019-2022

Salah satu tugas utama dari BPPP adalah mengelola penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi negeri baik jalur rapor prestasi maupun jalur tes. Tugas ini melanjutkan peran dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang telah selesai melaksanakan seleksi tahun 2022. Namun, selain mengelola seleksi masuk perguruan tinggi negeri, BPPP juga melanjutkan peran Pusat Asesmen Pendidikan dalam melakukan pelayanan pengujian kepada satuan kerja lain di internal Kemendikbudristek maupun instansi/kementerian lain. Oleh karena itu, pada bagian evaluasi kinerja ini akan dibahas hasil capaian layanan 2019-2022 serta kinerja keuangan seleksi masuk perguruan tinggi, sedangkan pada evaluasi kinerja sarana prasarana serta kinerja sumber daya manusia digunakan kondisi BPPP saat ini.

Tata kelola LTMPT yang selama ini diampu oleh Perguruan Tinggi Negeri dinilai masih perlu penyempurnaan dalam sistem seleksi penerimaan mahasiswa yang transparan dan akuntabel. Tata kelola organisasi model LTMPT ini mengalami kendala secara organisatoris karena lembaga ini hanya direpresentasikan sebagai sebuah tim yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang kurang fleksibel, kurang efektif, dan kurang efisien.

Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa keberadaan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang selama ini berjalan harus dilakukan perubahan karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. kepanitiaan tidak akuntabel apalagi dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga sebaiknya dibentuk satuan kerja;
b. kegiatan ini sudah 43 tahun dilaksanakan, sehingga seharusnya dapat dilembagakan;
c. kebutuhan akan lembaga tes yang kredibel dan fokus pada penyelenggaraan tes;
d. dana APBN yang dikelola per tahun seharusnya dikelola oleh satuan kerja, bukan dikelola oleh kepanitiaan yang sifatnya sementara;
e. dana masyarakat yang dikelola rata-rata sebesar 130 miliar per tahun, angka tersebut relatif sangat besar sehingga seharusnya dikelola oleh lembaga formal; dan
f. jumlah calon mahasiswa yang mendaftar relatif besar setiap tahunnya yaitu sebesar 1 juta orang untuk SNMPTN dan SBMPTN, sehingga perlu pengelolaan yang khusus dan profesional.

Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) tersebut, mendorong upaya perbaikan kelembagaan/organisasi terhadap pengelolaan

seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Pada sisi yang lain, lingkup asesmen menjadi sangat luas dan tidak semua kebutuhan pelayanan asesmen dapat ditangani oleh Pusat Asesmen Pendidikan. Hal itu terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Asesmen Pendidikan yang tidak hanya melakukan asesmen tetapi juga menyiapkan kebijakan teknis, mengembangkan instrumen, menyiapkan metode asesmen, serta melakukan analisis dan pelaporan asesmen. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong terhadap pemikiran perlunya dibentuk organisasi pengelola pengujian yang profesional dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang nantinya diharapkan dapat menjadi Badan Layanan Umum (BLU. Dengan UPT dimaksud, diharapkan layanan terhadap kebutuhan akan pengujian dapat dilakukan dengan lebih baik dan pengelolaannya sesuai kebutuhan serta menghasilkan informasi yang objektif yang dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, termasuk pengujian yang selama ini dilakukan oleh LTMPT.

A.1 Evaluasi Kinerja Layanan

a. Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Indikator kinerja yang diharapkan dapat dilihat dari jumlah pendaftar proses seleksi setiap jalur yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah pendaftar dan daya tampung prodi dari tahun 2019-2022 pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Daya Tampung PTN, Peserta Pendaftar, dan Peserta Diterima Periode 2019-2020

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Daya Tampung PTN	Peserta Pendaftar	Peserta Diterima	Daya Tampung PTN	Peserta Pendaftar	Peserta Diterima	Daya Tampung PTN	Peserta Pendaftar	Peserta Diterima	Daya Tampung PTN	Peserta Pendaftar	Peserta Diterima
Jalur Prestasi (SNMPTN)	98.105	694.477	92.331	100.858	701.464	96.496	113.232	854.599	110.459	122.651	882.238	120.643
Jalur Tes (SBMPTN)	162.038	1.422.767	168.742	167.569	1.402.269	168.291	182.265	1.544.851	184.942	194.181	1.588.706	192.810
Total	260.143	2.117.244	261.073	268.427	2.103.733	264.787	295.497	2.399.450	295.401	316.832	2.470.944	313.453

Pada tabel hasil pelaksanaan pengujian di atas, terlihat bahwa baik seleksi melalui jalur prestasi maupun jalur tes terdapat peningkatan daya tampung, peserta yang mendaftar, dan peserta yang diterima di PTN. Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2020 mengatur kuota penerimaan jalur prestasi adalah minimal 20% daya tampung dan penerimaan jalur tes adalah minimal 30% daya tampung. Sehingga peningkatan daya tampung mencerminkan potensi peningkatan jumlah pendaftar. Pada Tabel 2 terlihat peningkatan dari tahun ke tahun daya tampung dari 125 PTN/PTKIN/ISI/ISBI/POLTEK yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Hal ini menjadi perwujudan dari visi peningkatan akses pendidikan tinggi dan pemerataan

mutu pendidikan. Kebijakan ini merupakan bentuk *affirmative action* (tindakan afirmatif) untuk mendorong perluasan kesempatan, kesetaraan, dan keadilan dalam layanan pendidikan tinggi bagi peserta yang mempunyai prestasi. Proses seleksi dilakukan melalui penilaian rapor dan prestasi akademik yang dimiliki selama peserta didik mengenyam pendidikan di sekolah. Bagi peserta yang tidak lulus melalui jalur prestasi masih mempunyai peluang dalam mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggarakan secara terbuka.

Sama halnya dengan SNMPTN, pada SBMPTN juga terlihat peningkatan jumlah daya tampung dan peserta yang mendaftar setiap tahunnya. Kecenderungan peningkatan tersebut juga didukung dari kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi masuk PTN dilihat dari jumlah peserta yang mendaftar. Oleh karena itu, ke depan BPPP mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam melayani peningkatan jumlah pendaftar yang mengikuti seleksi PTN yang berkualitas agar masyarakat memiliki persepsi positif atau kepercayaan terhadap kinerja layanan yang telah diberikan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilakukan ke depan. Informasi terkait dengan jumlah daya tampung, pendaftar, dan peserta yang diterima SNMPTN dan SBMPTN dapat dilihat pada Tabel 10 halaman 20.

b. Layanan Pengujian Akademik dan Non Akademik

Pengujian akademik adalah proses pengukuran aspek-aspek akademik berkaitan dengan hasil belajar atau kapasitas akademik seseorang atau kelompok dengan tujuan dan dengan cara tertentu. Dengan demikian, layanan pengujian akademik merupakan suatu bentuk fasilitasi pengujian dalam rangka untuk memberikan informasi agregat terhadap kemampuan akademik seseorang, rapor pendidikan (satuan pendidikan/wilayah) yang digunakan untuk menentukan kelulusan, evaluasi hasil belajar, dan/atau evaluasi sistem pendidikan.

Sedangkan layanan pengujian non akademik adalah fasilitasi pengujian yang dilakukan untuk mengukur performansi maksimal (kognitif) dan performansi tipikal (non kognitif). Hasil pengujian akademik dan non akademik akan memberikan informasi mengenai potensi dan kepribadian yang melekat pada seseorang.

Layanan pengujian akademik dan non akademik dapat dilakukan dalam skala yang luas/ nasional, skala kecil, bahkan pada level individu. Adapun layanan pengujian yang dimaksudkan di sini adalah layanan pengujian untuk tujuan strategis atau tujuan-tujuan spesifik yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu keputusan dan/atau kebijakan pendidikan.

Untuk mendukung terselenggaranya layanan pengujian tersebut, diferensiasi sistem pengujian dikembangkan: berbasis “kertas dan pensil” (paper-pencil test),

berbasis komputer luring, semi daring, daring, serta berbasis media telepon genggam. Selain itu instrumen yang dikembangkan juga mencakup sasaran yang luas: murid, guru, tenaga pendidik, pegawai, maupun masyarakat umum baik mengukur capaian akademik maupun capaian non-akademik.

Layanan pengujian akademik yang dilakukan di antaranya: a) pengembangan desain, penyusunan instrumen dan pengembangan soal yang didasarkan pada capaian pembelajaran pada dokumen kurikulum; b) sistem pendataan peserta pengujian akademik; dan c) pelaksanaan pengujian akademik. Contoh layanan pengujian akademik adalah seleksi akademik pendidikan profesi guru yang menguji penguasaan substansi mata pelajaran.

Sementar pelayanan tes non akademik di antaranya penyelenggaraan: a) Tes Bakat Skolastik (TBS) untuk jenjang SMP sampai dengan perguruan tinggi; b) Kesiapan belajar untuk jenjang PAUD/TK; c) Tes bakat minat untuk usia remaja; d) Tes inventori/psikometri untuk usia remaja sampai dewasa; e) Tes kepribadian; f) Tes seleksi beasiswa; dan g) Tes seleksi non akademik lainnya yang relevan.

Di samping layanan yang telah dijabarkan di atas, BPPP juga sedang menyiapkan dan mengembangkan diversifikasi layanan dengan model kemitraan. Layanan tersebut pada dasarnya merupakan perluasan dari layanan Pusat Asesmen Pendidikan yang telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun cakupan diversifikasi layanan dimaksud meliputi layanan pengujian untuk seleksi beasiswa, seleksi pendidikan magister, seleksi pegawai, seleksi siswa berprestasi, seleksi guru PPPK, seleksi program pendidikan guru, serta pemetaan kompetensi pegawai untuk penempatan serta promosi. Lebih detail terkait informasi Layanan Pengujian Akademik dan Non Akademik dapat dilihat pada Tabel 12 halaman 25.

A.2 Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran seberapa baik pengelolaan keuangan LTMPT dilihat dari penggunaan aset lembaga serta pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dalam penyelenggaran seleksi masuk perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan seleksi masuk PTN baik melalui SNMPTN dan SBMPTN, anggarannya bersumber dari APBN-Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pengumpulan dana masyarakat melalui uang pendaftaran. Sehingga dalam pengelolaan keuangan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta melaporkan penggunaan anggaran yang telah

dilaksanakan serta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur sebagai mekanisme akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Adapun rincian keuangan dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Laporan Keuangan LTMPT dan BPPP Periode Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022 (LTMPT, BLN. JAN - AGUS 2022)			TAHUN 2022 (BP3, BLN. OKT - DES 2022)		
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	SISA
PNBP BPPP Seleksi Mahasiswa (Jalur Tes (SBMPTN))	188.212.200.000	188.212.200.000	-	94.469.100.000	94.469.100.000	-	226.253.027.032	226.253.027.032	-	142.131.293.753	149.398.748.000	-	-	-	-
PENERIMAAN DIPA (Jalur Prestasi (SNMPTN))	100.000.000.000	90.695.037.728	9.304.962.272	40.000.000.000	39.999.951.200	48.800	40.000.000.000	40.000.000.000	-	45.000.000.000	44.585.200.000	414.800.000	10.000.000.000	8.922.083.641	1.077.916.359
TOTAL	288.212.200.000	278.907.237.728	9.304.962.272	134.469.100.000	134.469.051.200	48.800	266.253.027.032	266.253.027.032	-	187.131.293.753	193.983.948.000	414.800.000	10.000.000.000	8.922.083.641	1.077.916.359

Laporan keuangan periode tahun 2019-2022 memberikan informasi terjadinya fluktuasi terkait pendapatan, realisasi penggunaan anggaran, dan sisa anggaran dalam pelaksanaan seleksi masuk PTN. Fluktuasi pendapatan tersebut terjadi baik pada rupiah murni dari Alokasi APBN maupun dari pendapatan PNBP. Pendapatan yang fluktuatif tersebut berkorelasi dengan jumlah pendaftar yang mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 pada kondisi puncak. Kemudian pendapatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 seiring dengan semakin pulihnya kondisi pandemi.

Pada tahun 2022, LTMPT mendapatkan APBN dan PNBP, sedangkan BPPP hanya mendapatkan APBN. Secara akumulatif, jumlah anggarannya adalah Rp197.131.753,00 dengan rincian LTMPT mengelola anggaran sebesar Rp187.131.293.753,00 pada periode Januari-Desember. Sedangkan BPPP mengelola anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 pada periode Oktober-Desember. Namun meskipun ada fluktuasi, namun secara umum, pendapatan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru baik SNMPTN maupun SBMPTN yang berasal dari alokasi APBN (Rupiah Murni) dan Pendapatan PNBP cukup stabil, sehingga prospek pengelolaan BPPP dalam format Badan Layanan Umum (BLU) rasional. Dengan kecenderungan kenaikan pendapatan dari sumber masyarakat (PNBP) disertai dengan pengelolaan yang efisien dan efektif melalui BLU maka diproyeksikan pendapatan dari sumber APBN dapat lebih ditekan sehingga secara keseluruhan, pengelolaan keuangan BLU-BPPP secara akuntabilitas dapat dioptimalkan. Detail terkait informasi laporan keuangan LTMPT dan BPPP tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel 13 halaman 26.

A.3 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi kinerja sumber daya manusia adalah sebuah mekanisme untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks sumber daya manusia BPPP, maka istilah kuantitas dan kualitas tersebut dapat diterjemahkan secara operasional, yakni jumlah pegawai yang diperlukan pada kelas dan kelompok jabatan

untuk masing-masing kelompok pekerjaan yang ada dalam organisasi BPPP. Adapun kelas jabatan tersebut menggambarkan kompetensi dan kualifikasi sekaligus menjadi acuan dalam menentukan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap pegawai di kelompok jabatan masing-masing.

Dalam pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi sampai dengan pertengahan tahun 2022, melalui pembentukan panitia pelaksana yang melibatkan PTN. Keterlibatan PTN mencakup dewan pengarah, penanggung jawab, ketua, koordinator serta anggota tim. Dewan pengarah terdiri dari pimpinan majelis rektor sebagai pengarah nasional serta pimpinan setiap PTN sebagai pengarah di masing-masing PTN. Sedangkan koordinator membidangi ruang lingkup pekerjaan yang spesifik, yaitu: a) pengembangan materi tes dan penilaian; b) pengembangan sistem pelaksanaan tes; c) tim teknologi informasi dan komunikasi; d) hubungan masyarakat dan promosi; e) penjaminan mutu serta kajian dan pengembangan; f) bidang helpdesk, call center, dan front desk; dan g) bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan.

Namun komposisi sumber daya manusia yang diajukan dalam struktur personalia BPPP adalah modal utama bagi lembaga ini dalam upaya pengembangan bisnis yang lebih baik di bidang pengujian pendidikan yang diproyeksikan menjadi BLU. Untuk menjalankan proses bisnis yang baik, BPPP membutuhkan struktur manajemen dasar yang kuat sebagaimana diproyeksikan. Adapun komposisi SDM yang melaksanakan kegiatan pengujian dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah SDM Eksisting Tahun 2022

No.	Formasi	2022	
		BPPP	Tim Persiapan Seleksi Nasional
1	Kepala BP3	1	-
2	Kepala Sub Bagian Umum	1	-
	Pokja Pengujian	4	13
	Pokja Data dan Evaluasi	1	5
	Pokja Kemitraan dan Unit Usaha	1	1
	Urusan Program dan Keuangan	6	8
	Urusan Kepegawaian	2	6
	Urusan Rumah Tangga	2	-
	Administrasi dan Keuangan	0	-
Total		18	33

Pada tahun 2022 dalam melakukan kegiatan penilaian, BPPP dibantu oleh 58 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), di antaranya terdiri dari 18 orang pegawai BPPP yang bertugas dalam melakukan kegiatan teknis pengujian dan bagian administrasi yang bertugas mendukung terlaksananya kegiatan pengujian. Pada saat ini dalam menjalankan kegiatan pengujian, BPPP juga melibatkan tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) dari perguruan tinggi sebanyak 33 orang. Pelibatan tim SNPMB ini utamanya dilakukan pada masa transisi karena jadwal pelaksanaan seleksi 2023 sudah dimulai sejak Oktober 2022 dan menggunakan yang sudah ada. Detail terkait informasi jumlah SDM eksisting tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 14 halaman 27.

A.4 Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan pelayanan pengujian pendidikan, terdapat sejumlah sarana prasarana yang mendukung kinerja BPPP. Evaluasi kinerja sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sarana prasarana penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi negeri yang dilihat dari kecukupan, kelayakan, keamanan, dan kesesuaian perangkat penyelenggaraan tes dimaksud. Kebutuhan sarana dan prasarana mendukung manajemen pendataan daya tampung, pendataan calon peserta, pendataan peserta, pendataan pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti teknisi, pengawas, dll. Sarana prasarana juga dimanfaatkan untuk inventarisir dokumen dan proses seleksi, pengolahan data hasil pengujian dan inventarisir sertifikat hasil pengujian. Selain manajemen pendataan, terdapat sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan seleksi berbasis komputer, baik infrastruktur di pusat, infrastruktur di setiap lokasi ujian, maupun infrastruktur pengawasan dan monitoring.

Sebagai unit baru, BPPP sedang mengembangkan sistem seleksi di antaranya: a) penyiapan infrastruktur pengelolaan pengujian pendidikan; b) penyiapan sistem pengujian pendidikan; c) pengembangan sistem bank soal dan penilaian; d) pengembangan sistem penilaian portofolio; e) pelayanan call centre, help desk, dan front desk; f) pengembangan sistem sosialisasi dan promosi; dan g) pengembangan sistem penunjang kesekretariatan. Namun sampai saat ini, BPPP belum memiliki aset tetap per 31 Desember 2022 dikarenakan aset tetap yang digunakan oleh BPPP masih tercatat pada Pusat Asesmen Pendidikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Aset Tetap

Uraian	Keterangan
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	• 6 unit Notebook dan 1 unit Laptop • 2 unit LCD Projector/Infocus dan 1 unit Focusing Screen/Layar LCD Projector • 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) • 1 unit Mini Bus
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-

Berdasarkan tabel di atas, untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, BPPP menggunakan bangunan yang digunakan sebagai kantor yang bertempat di area perkantoran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Gardu RT 10/RW 02, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640. Lebih lanjut sarana dan prasarana BPPP terus berkembang disesuaikan dengan layanan yang diberikan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan, di mana hal tersebut merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh BPPP. Detail terkait informasi aset BPPP dapat dilihat pada Tabel 15 halaman 29.

B. Analisis SWOT

Hasil evaluasi kinerja selama tiga tahun terakhir (2020-2022) dan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang dapat digunakan sebagai sumber daya bagi BPPP dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dan menghadapi ancaman-ancaman. Hasil evaluasi, analisis SWOT, dan penentuan posisi BPPP dalam matriks *grand strategy* dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

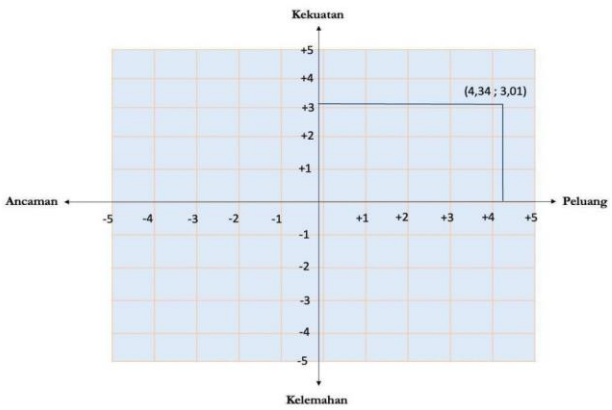

Gambar 1. Posisi BPPP dalam Matriks *Grand Strategy*

Hasil plotting kekuatan/kelemahan versus kesempatan/ancaman merefleksikan posisi aktual BPPP secara objektif dan rasional sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1. Hasil yang diperoleh menunjukkan posisi BPPP berada dalam kuadran I, artinya seluruh akumulasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terakomodasi dalam posisi BPPP yang layak melakukan strategi pengembangan atau dalam posisi strategi pertumbuhan. Rasionalisasi tersebut menunjukkan bahwa BPPP telah menyadari di mana posisi aktualnya. Posisi ini menjadi landasan dalam penetapan rasional untuk pengembangan kelembagaan dengan tata kelola secara tepat melalui satuan kerja (satker) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

Dalam konteks BLU, terdapat dua tema besar Rencana Induk Pengembangan yang relevan yaitu “Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas” dan “Mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengujian (Tes) yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi”. BPPP sebagai penyedia SDM bidang pengujian yang unggul, serta pelaksana seleksi/tes, maka kualitas layanan baik layanan pendidikan maupun non pendidikan menjadi hal yang harus diutamakan. Dengan BPPP menjalankan pola satker saat ini, akan memperlambat pencapaian target BPPP misalnya untuk perencanaan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas, aksesibilitas ujian masuk perguruan tinggi, pengelolaan pengujian (tes) melalui perluasan akses bagi pihak yang memerlukan, serta kendala lainnya yaitu keterbatasan aturan penerimaan keuangan dalam pengelolaan kerja sama.

C. Inisiatif Strategis

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, BPPP menetapkan rincian inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta BPPP dalam pengelolaan pengujian pendidikan di Indonesia.
2. Meningkatan kualitas layanan pengujian pendidikan.
3. Meningkatkan pemerataan akses layanan pengujian pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan jumlah peserta pengujian pendidikan melalui perluasan jejaring serta moda pengujian.
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk pengelolaan data dan informasi yang efektif serta efisien.
6. Diversifikasi layanan pengujian pendidikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk berkompeten dalam mengelola pengujian secara profesional.

8. Menjaga integritas satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan pengujian pendidikan.
9. Mengembangkan kelembagaan melalui pemanfaatan fleksibilitas pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat melalui tata kelola satker BLU.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan inisiatif strategis tersebut, untuk mencapai sasaran strategis (lampiran II dan indikator lampiran III), BPPP menyusun strategi bisnis yang akan dijalankan dalam 5 tahun ke depan yang dapat dilihat dalam 5 aspek, yaitu:

A. Aspek Layanan
B. Aspek Keuangan
C. Aspek SDM
D. Aspek Sarana dan Prasarana
E. Aspek Investasi dan Inovasi

BAB III
RENCANA STRATEGI BISNIS 5 (LIMA) TAHUN

A. Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Mengacu pada tujuan Kemendikbudristek sebagaimana tertuang pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka esensi penguatan kelembagaan pengujian khususnya untuk seleksi masuk perguruan tinggi sangat diperlukan. Hal itu dapat diaktualisasikan melalui BLU-BPPP terutama untuk mendukung tujuan Kemendikbudristek yang dimaksud yaitu: 1) perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif; dan 2) penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, guna mempercepat pencapaian program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang tertuang dalam rencana strategis tersebut maka BPPP mengusulkan pembentukan satuan kerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dengan penerapan PPK-BLU, BPPP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik khususnya dalam pelayanan pengujian.

Ketika BPPP menjadi PPK-BLU maka fleksibilitas kegiatan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran, dimana dalam pengelolaan penerimaan yang merupakan hasil kegiatan BLU, BPPP dapat menggunakan dana yang telah diterima tanpa harus setor ke kas negara terlebih dahulu, sehingga dapat mempercepat pemberian layanan terhadap masyarakat. Salah satu hal penting dalam layanan pengujian adalah ketepatan waktu layanan. Penundaan waktu pengujian dapat berimplikasi kepada hal yang kritis misalnya keterlambatan awal tahun pembelajaran.
2. Pendistribusian anggaran, peningkatan layanan BPPP sangat dipengaruhi oleh kemudahan dalam penyaluran dana ke pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan pelaksanaan pengujian. Misal untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, PTN ditugaskan menjadi lokasi pengujian dan memerlukan dana operasional. Pendistribusian anggaran antara satuan kerja ke satuan kerja lainnya dalam lingkup kementerian yang sama menuntut mekanisme birokrasi yang relatif panjang dan beresiko kepada keterlambatan layanan;

3. Pengelolaan layanan, ketika BPPP menjadi BLU, birokrasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih singkat dan lebih ringkas karena masyarakat dapat mengajukan permintaan layanan pengujian langsung kepada BPPP. Permintaan layanan yang sifatnya non-reguler juga dapat terpenuhi dengan lebih lincah karena pengelolaan anggaran PNBP dapat dilakukan sewaktu-waktu;
4. Pengelolaan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana, ketika BPPP menjadi PPK-BLU, dapat menggunakan tenaga profesional pengujian baik dari ASN ataupun tenaga ahli lainnya non-ASN. Sedangkan pengelolaan sarana dan prasarana, PPK-BLU dapat mempunyai fleksibilitas dalam merencanakan belanja modal untuk mendukung peningkatan dan percepatan layanan pengujian kepada masyarakat.

B. Strategi Bisnis BPPP

BPPP mengembangkan strategi bisnis yang selaras dengan program Kemendikbudristek yang secara operasional dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan indikator yang dijabarkan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Rencana Strategis Selama 5 Tahun

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Sasaran strategis	Sasaran Program (impact)	Sasaran Kinerja (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (rincian output)	Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan .karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan serta indeks karakter dan indeks kualitas lingkungan belajar	Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	Peserta Pengujian Pendidikan yang terlayani	1.370.000	1.470.000	1.620.000	1.730.000	1.840.000	1.960.000
			Mitra Lembaga yang Mendapatkan layanan pengujian pendidikan	74	124	188	190	194	200
			Bahan rekomendasi kebijakan hasil asesmen pendidikan	-	1	1	1	2	2

Berdasarkan tabel di atas, outcome BPPP yaitu “tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan”. Hal tersebut sesuai dengan Arah Kebijakan Kemendikbudristek yang tertuang pada Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 yaitu “peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan”. Pengujian terstandar dapat memberikan peta kompetensi yang akurat untuk membantu strategi pembelajaran yang tepat serta kebijakan yang lebih terarah. Demikian pula halnya dengan pengujian yang ter-benchmark dengan kompetensi global, maka kompetensi peserta didik dapat didorong daya saingnya. Oleh karena itu, outcome dari BPPP mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas” dan “meningkatkan produktivitas dan daya saing”. Pada akhirnya, BPPP ikut mendukung tercapainya Agenda Pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”.

C. Proyeksi Kuantitas Layanan yang Akan Dijalankan BPPP dalam 5 Tahun ke Depan

BPPP berupaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan dalam 5 tahun ke depan. Hal ini bertujuan agar tumbuhnya kepercayaan serta terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengujian. Bila kualitas layanan terjaga dengan baik maka akan terjadi peningkatan kuantitas layanan. Adapun proyeksi kuantitas layanan yang akan dijalankan oleh BPPP 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 7.

Dari tabel 7, proyeksi kuantitas layanan merupakan gambaran terkait kualitas layanan pengujian yang dilakukan oleh BPPP baik kegiatan seleksi maupun pengujian akademik/non akademik. Arah pengembangan BPPP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memformulasikan arah pengembangan yang dideskripsikan dalam bentuk posisi dan kondisi yang harus dicapai organisasi, yang terfokus pada kinerja layanan pengujian yang kredibel dan berintegritas. Detail terkait informasi proyeksi target layanan pengujian 5 tahun ke depan periode tahun 2023-2027 dapat dilihat pada Lampiran II halaman 42.

Tabel 7. Proyeksi Target Jumlah Peserta Layanan Pengujian 5 Tahun ke Depan

No.	Kegiatan	Tarif	Perhitungan Angka Dasar	Target Jumlah Peserta 5 Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Layanan SNBT Non KIP Kuliah	200.000	518.187 (SBMPTN)	540.000	565.000	600.000	620.000	660.000
2	Layanan SNBT KIP Kuliah	-	282.665 (SBMPTN)	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
3	yanan SNBP	-	612.049 (SBMPTN)	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
4	Layanan pengujian akademik berbasis mata pelajaran	100.000	500 (ITB)	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
5	Layanan pengujian akademik berbasis	200.000	32.500 (PPG Pra Jabatan)	35.000	40.000	47.500	55.000	65.000

No.	Kegiatan	Tarif	Perhitungan Angka Dasar	Target Jumlah Peserta 5 Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	literasi numerasi							
6	Layanan pengujian non akademik untuk potensi diri	50.000	14.400 (LPDP)	15.500	17.000	18.500	21.500	24.000
7	yanan pengujian non akademik lainnya	25.000	230.000 (OSN)	240.000	255.000	275.000	295.000	320.000

D. Proyeksi Pendapatan

BPPP merencanakan pengelolaan keuangan atau anggaran agar dapat memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode 5 tahun ke depan. Proyeksi pendapatan tersebut dapat memperkirakan seberapa banyak hasil yang diperoleh BPPP selama periode waktu 2023-2027. Dari estimasi perhitungan pendapatan yang dilakukan baik BPPP sebagai PPK-BLU maupun tidak, PNBP yang terkumpul selalu meningkat, di mana proyeksi pendapatan tertinggi mencapai Rp154.500.000.000,00 pada tahun 2027 dengan tata kelola PPK-BLU. Adapun rincian prediksi pendapatan dapat dilihat dari grafik berikut:

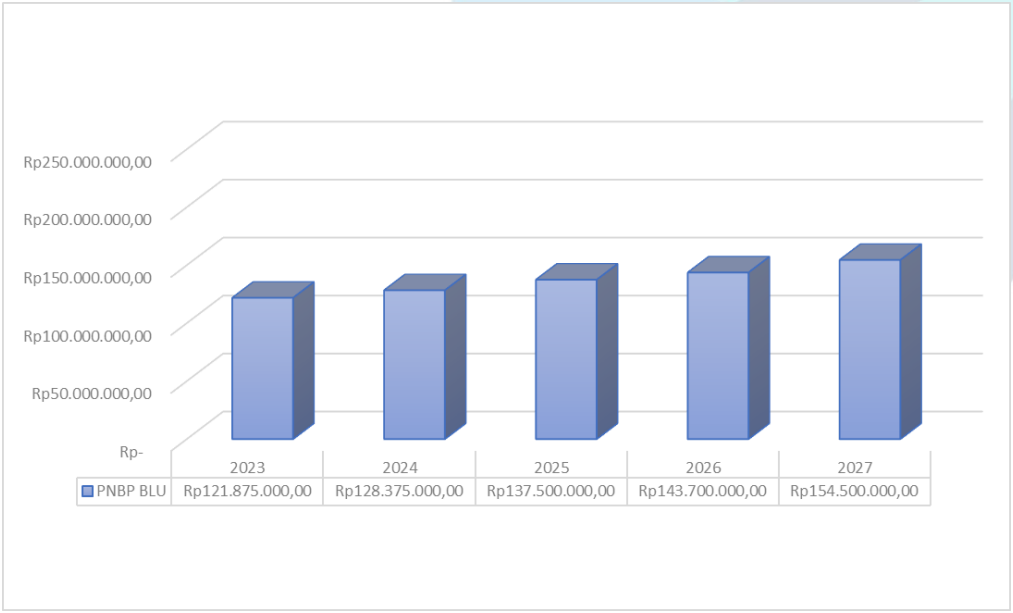

Grafik 1. Proyeksi PNBP BLU 5 Tahun Periode 2023-2027

Dari grafik di atas, informasi proyeksi PNBP BPPP sebagai satker BLU yang berpotensi generate revenue diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 5%, tahun 2025 sebesar 7%, tahun 2026 sebesar 4.5%, dan tahun 2027 sebesar 7.5% yang diikuti dengan peningkatan jumlah peserta yang mengikuti layanan pengujian. Detail terkait informasi proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan periode tahun 2023-2027 dapat dilihat pada Tabel 31 halaman 49.

E. Proyeksi Anggaran 5 Tahun ke Depan

Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber dan pemakaian sumber daya keuangan dalam suatu periode tertentu yang dikelola oleh BPPP yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi dan rencana kerja yang telah disusun. Proyeksi Pendapatan BPPP yang bersumber dari APBN atau rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode tahun 2023-2027 disajikan pada tabel 30.

Dari tabel 30 terlihat bahwa fokus anggaran BPPP sebagai unit baru, pengeluaran belanja lebih terfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan sistem teknologi informasi, di mana fokus tersebut dilakukan pada tahun-tahun awal pembentukan BPPP agar tidak terjadi gangguan layanan kegiatan pengujian. Rencana pengembangan infrastruktur fisik baru akan dimulai pada tahun 2024 dan dimulai dengan pembangunan fisik pada tahun 2025. Rencana pola pengujian adalah memberikan pelayanan secara rutin sehingga peserta pengujian yang siap melaksanakan ujian dapat sewaktu-waktu mendaftarkan dirinya, tidak perlu menunggu waktu ujian yang ditetapkan secara sempit untuk skala nasional. Untuk mewujudkan rencana ini, diperlukan unit layanan pengujian, berupa lokasi ujian yang terstandar dan memberikan layanan sepanjang tahun. Hal ini berimplikasi pada belanjasarana prasarana maupun SDM unit layanan pengujian. Detail terkait informasi proyeksi belanja 5 tahun periode 2023-2027 dapat dilihat pada Tabel 30 halaman 48.

Tabel 8. Pendapatan dan Belanja Anggaran 5 Tahun Periode 2023-2027

KOMPONEN	2023	2024	2025	2026	2027
PNBP	121.875.000.000	128.375.000.000	137.500.000.000	143.700.000.000	154.500.000.000
APBN (DIPA)	200.000.000.000	110.000.000.000	105.000.000.000	100.000.000.000	95.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	321.875.000.000	238.375.000.000	242.500.000.000	243.700.000.000	249.500.000.000
Beban Pegawai	3.971.851.000	4.519.657.600	5.042.783.500	9.878.805.150	11.496.739.050
Beban Persediaan	26.115.000	28.671.750	31.233.000	32.785.500	30.549.500
Beban Barang dan Jasa	198.653.799.918	207.173.302.477	214.365.068.203	230.029.471.226	234.032.868.321
Beban Pemeliharaan	-	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	84.209.578	1.888.257.969	4.812.037.605	6.451.847.879	7.584.553.458
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN TOTAL	202.735.975.496	213.609.889.796	224.251.122.308	246.392.909.755	253.144.710.329
JUMLAH BEBAN RM	93.793.617.168	106.447.668.360	98.354.194.799	99.968.870.524	94.339.896.267
JUMLAH BEBAN PNBP	108.942.358.328	107.162.221.436	125.896.927.509	146.424.039.231	158.804.814.062
(DEFISIT)/SURPLUS (PENDAPATAN PNBP - BEBAN PNBP)	12.932.641.672	21.212.778.564	11.603.072.491	(2.724.039.231)	(4.304.814.062)
(DEFISIT)/SURPLUS (APBN - BEBAN RM)	106.206.382.832	3.552.331.640	6.645.805.201	31.129.476	660.103.733

F. Proyeksi SDM 5 Tahun ke Depan

Sebagai langkah awal pembentukan organisasi BPPP, dibutuhkan sumber daya manusia untuk memastikan layanan utama BPPP dapat terus berjalan dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan tenaga profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN)/non ASN periode tahun 2023-2027 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja pada masing-masing unit kerja. Proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan periode tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Proyeksi Jumlah SDM BPPP 5 Tahun ke Depan Periode Tahun 2023-2027

Formasi	2022 (Eksisting)	2023	2024	2025	2026	2027
Kepala BPPP	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Umum	1	1	1	1	1	1
Kelompok Kerja	**10**	**32**	**40**	**63**	**80**	**102**
A. Pokja Pengujian	3	8	10	27	44	61
B. Pokja Data dan Evaluasi	1	11	14	16	16	17
C. Pokja Kemitraan dan Unit Usaha Bisnis	1	5	7	8	8	11
D. Pokja Administrasi dan Keuangan	5	8	9	12	12	13
Subbagian Umum	**6**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**
A. Urusan Program dan Keuangan	2	3	3	3	3	3
B. Urusan Kepegawaian	2	3	3	3	3	3
C. Urusan Rumah Tangga	2	4	5	5	5	5
Proyeksi Kebutuhan SDM Per Tahun	**18**	**44**	**53**	**76**	**93**	**115**

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan kebutuhan SDM seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan pengujian. Adapun proyeksi kebutuhan SDM sampai tahun 2027 adalah sebanyak 115 pegawai sesuai dengan kebutuhan kelompok kerja. Proyeksi tersebut sudah disesuaikan dengan *milestone* BPPP pada tahun pertama dan kedua pembentukannya yang didasarkan pada penguatan tata kelola organisasi. Dengan penguatan tata kelola, diharapkan UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dapat menyiapkan perangkat yang tepat yang dibutuhkan dalam menjalankan operasionalnya sehingga dapat menciptakan kualitas layanan prima. Detail terkait informasi proyeksi SDM 5 tahun periode 2023-2027 dapat dilihat pada Tabel 33 halaman 51.

BAB IV
PENUTUP

Upaya dan kebijakan Kemendikbudristek dalam mendorong percepatan transformasi layanan pendidikan yang bermutu ditempuh, salah satunya melalui transformasi organisasi dan kelembagaan. Transformasi kelembagaan sebagai bagian dari pengembangan kinerja organisasi tentunya tidak memiliki terminasi melainkan suatu proses yang terus berkelanjutan.

Demikian halnya dengan proses pengembangan BPPP menjadi BLU. Proses tersebut adalah sebuah ikhtiar yang diorientasikan untuk memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan pengujian. Transformasi BLU-BPPP bukan semata metamorfosa untuk mengubah bentuk kelembagaan namun lebih kepada membangun ekosistem yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah pada kinerja pelayanan pengujian pendidikan.

Eksistensi BLU-BPPP lebih lanjut akan ditentukan oleh banyak hal. Faktor budaya organisasi, kepemimpinan, dan tata kelola secara umum adalah bagian dari hal yang sangat menentukan resiliensi organisasi. Bukan hanya untuk sekedar bertahan, tetapi untuk terus bertumbuh seiring dengan tantangan dan harapan masyarakat. Maka untuk itulah, Rencana Strategi Bisnis ini dihadirkan sebagai respon rasional-konseptual yang telah diartikulasikan dalam dokumen sederhana ini. Semoga bermanfaat adanya.

LAMPIRAN I

A. Evaluasi Kinerja LTMPT dan BPPP Periode 2019-2022

Tabel 10. Daya Tampung, Pendaftar, dan Peserta yang Diterima SNMPTN dan SBMPTN pada Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tahun	Daya Tampung SNMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
2020	100.858	701.464	96.496	167.569	1.402.269	168.291
2021	113.232	182.265	854.599	110.459	1.544.851	184.942
2022	122.651	194.181	882.238	120.643	1.588.706	192.810

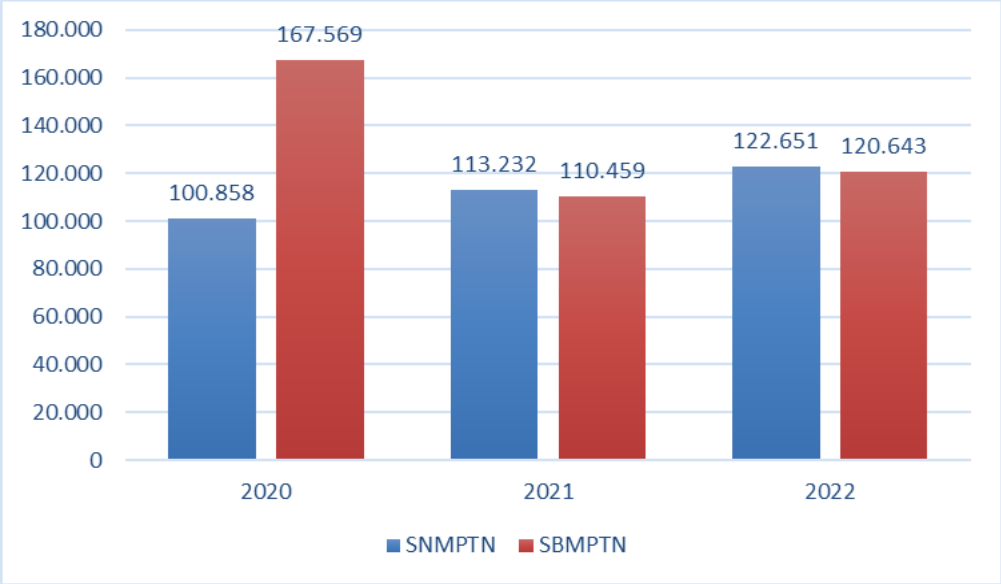

Grafik 2. Daya Tampung SNMPTN dan SBMPTN pada Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tabel 11. Daya Tampung, Pendaftar, dan Peserta yang Diterima SNMPTN dan SBMPTN Setiap Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2022

Nama PTN	Daya Tampung SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
Universitas syiah kuala	1954	3496	12754	1982	25041	3518
Universitas malikussaleh	3104	2496	5964	2402	7687	2593
Universitas teuku umar	940	1175	1647	1138	2576	1171
Universitas samudra	800	800	2132	783	2538	842
Isbi aceh	81	108	15	14	53	28
Universitas islam negeri ar-raniry	432	574	991	457	1003	549
Universitas sumatera utara	2085	2416	28545	1985	44308	2479
Universitas negeri medan	1579	3922	22472	1578	25619	3916

Nama PTN	Daya Tampung SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
Universitas islam negeri sumatera utara	612	796	3743	612	2504	957
Universitas riau	1884	2512	21656	1883	29902	2656
Universitas islam negeri sultan syarif kasim	390	978	3615	390	3341	1001
Universitas maritim raja ali haji	1204	962	1813	1088	1571	864
Universitas andalas	1407	2814	17886	1427	34782	2936
Universitas negeri padang	2599	3459	18967	2867	33780	3457
Isi padang panjang	334	444	395	303	726	403
Universitas jambi	1810	3251	10950	1804	18152	3346
Universitas bengkulu	908	2270	7398	909	13779	2281
Universitas sriwijaya	1565	3913	19628	1605	35157	4146
Universitas islam negeri raden fatah	224	560	970	213	862	456
Universitas bangka belitung	604	788	2148	589	2716	838
Universitas lampung	3063	5729	15385	3027	30170	5755
Institut teknologi sumatera	2505	2505	6814	2372	11123	2951
Politeknik negeri lhokseumawe	406	331	654	455	972	393
Politeknik negeri medan	212	391	1356	213	2021	438
Politeknik negeri batam	234	312	1364	318	1184	309
Politeknik negeri bengkalis	383	276	513	379	474	244
Politeknik negeri padang	230	310	942	225	2216	453
Politeknik pertanian negeri payakumbuh	138	120	261	115	400	159
Politeknik negeri sriwijaya	570	572	2152	551	3899	869
Politeknik manufaktur negeri bangka belitung	36	90	188	36	270	94
Politeknik negeri lampung	465	525	439	314	778	488
Universitas sultan ageng tirtayasa	1241	2238	17589	1242	19142	2500
Universitas indonesia	1115	1676	15935	1115	42440	1707
Universitas islam negeri jakarta	952	1291	11557	952	15348	1372
Universitas negeri jakarta	1265	2278	24526	1216	39431	2294
Upn "veteran" jakarta	684	1713	13714	684	30447	1738
Universitas terbuka	100	0	242	82	13122	0
Universitas singaperbangsa karawang	990	1316	10196	1011	21942	1428
Institut teknologi bandung	2021	1716	10877	2085	56529	1724
Universitas padjadjaran	1720	2796	31101	1627	52468	2688
Universitas pendidikan indonesia	2927	4741	32191	3038	975	4739
Isbi bandung	150	243	491	126	7342	232
Universitas islam negeri sunan gunung djati	683	910	7441	683	19496	1009
Institut pertanian bogor	1700	1546	16224	2041	12014	1546
Universitas siliwangi	654	1635	7984	830	33377	1833

Nama PTN	Daya Tampung SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
Universitas jenderal soedirman	1435	1912	17768	1443	9378	1943
Universitas tidar	602	1505	5175	602	53358	1549
Universitas sebelas maret	1597	2805	22637	1635	1734	2860
Isi surakarta	201	505	698	176	55758	452
Universitas diponegoro	2152	3231	26922	2219	41641	3258
Universitas negeri semarang	3084	4099	31967	3083	2491	4289
Universitas islam negeri walisongo	372	673	2713	489	58697	810
Universitas gadjah mada	2690	2690	27617	2690	42425	2716
Universitas negeri yogyakarta	1752	2334	22914	1776	24646	2334
Upn "veteran" yogyakarta	966	2424	8738	966	4335	2448
Isi yogyakarta	351	466	2101	346	5319	476
Universitas islam negeri sunan kalijaga	285	694	3408	285	31900	724
Universitas jember	2380	3819	15884	2380	61810	3940
Universitas brawijaya	3439	5145	30989	3445	31894	5160
Universitas negeri malang	1604	2425	18373	1695	5572	3358
Universitas islam negeri malang	650	1250	4248	647	31088	1304
Universitas airlangga	1256	1884	14147	1425	19778	1925
Institut teknologi sepuluh nopember	1112	1644	9457	1189	39866	1646
Universitas negeri surabaya	2862	5038	21500	2857	8326	5158
Universitas trunojoyo madura	1568	2708	4712	1559	19782	3338
Upn "veteran" jawa timur	1662	2232	9787	1668	5066	2284
Universitas islam negeri sunan ampel surabaya	524	937	4094	524	6024	970
Politeknik negeri jakarta	564	649	3640	547	662	669
Politeknik negeri media kreatif	141	197	468	136	6153	215
Politeknik negeri bandung	288	522	3513	288	548	534
Politeknik manufaktur bandung	45	74	353	44	167	143
Politeknik negeri indramayu	54	90	203	54	0	90
Politeknik negeri semarang	344	344	1545	341	2512	406
Politeknik negeri cilacap	48	54	41	39	115	63
Politeknik negeri banyuwangi	196	196	290	194	428	230
Politeknik negeri jember	702	936	1237	588	2419	859
Politeknik negeri madiun	30	40	326	30	463	43
Politeknik negeri malang	661	909	2734	637	4970	939
Politeknik perkapalan negeri surabaya	352	476	856	377	1650	490
Politeknik elektronika negeri surabaya (pens)	212	240	1293	212	2043	248
Universitas tanjungpura	1687	3204	9207	1624	19981	3369
Politeknik negeri pontianak	229	411	744	222	1648	430
Politeknik negeri ketapang	40	80	65	37	112	56

Nama PTN	Daya Tampung SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
Politeknik negeri sambas	128	172	307	156	639	206
Universitas palangkaraya	1163	2913	3927	1369	6944	2753
Universitas lambung mangkurat	1251	3128	9526	1253	19195	3350
Politeknik negeri banjarmasin	132	165	115	96	245	128
Politeknik negeri tanah laut	54	72	65	57	72	33
Universitas mulawarman	1648	2530	9868	1632	19067	2612
Institut teknologi kalimantan	650	942	1581	601	2572	919
Universitas borneo tarakan	642	856	1733	627	3210	912
Politeknik pertanian negeri samarinda	54	102	51	42	82	49
Politeknik negeri samarinda	282	282	784	276	1558	330
Politeknik negeri balikpapan	31	56	100	22	155	81
Universitas udayana	1910	2546	13759	2278	26186	2766
Universitas pendidikan ganesha	1124	1493	3587	1058	6207	1734
Isi denpasar	217	288	371	189	687	244
Politeknik negeri bali	301	541	1041	418	1770	518
Universitas mataram	1240	3100	9716	1245	20289	3252
Universitas nusa cendana	1689	3054	7354	1656	19137	3482
Universitas timor	484	1210	472	412	3208	1193
Politeknik negeri kupang	240	599	425	227	2070	647
Politeknik pertanian negeri kupang	182	242	106	88	186	103
Universitas Hasanuddin	2315	4025	20761	2247	42580	4241
Universitas negeri makassar	2535	3592	13553	2475	26775	4483
Universitas islam negeri alauddin	531	707	2476	523	3014	637
Politeknik negeri ujung pandang	344	454	750	343	1781	518
Politeknik pertanian negeri pangkajene kepulauan	118	158	182	103	363	165
Universitas sam ratulangi	1582	3925	4563	1469	9290	3215
Universitas negeri manado	1488	1984	1775	1513	2467	1320
Politeknik negeri manado	341	450	312	212	514	260
Universitas tadulako	1885	4166	6098	1692	15675	3534
Universitas sulawesi barat	758	1897	1934	1558	4392	1730
Universitas haluoleo	2564	3419	7425	2283	18499	3253
Universitas negeri gorontalo	2062	2941	4532	1658	10968	2778
Universitas sembilan belas november kolaka	719	1295	491	379	1018	526
Universitas pattimura	1641	4052	2184	1187	3866	1642
Universitas khairun	1414	1885	1341	870	2827	1021
Politeknik negeri ambon	156	208	142	129	180	79
Politeknik perikanan negeri tual	62	155	7	6	6	5

Nama PTN	Daya Tampung SNMPTN	Daya Tampung SBMPTN	Pendaftar SNMPTN	Terima SNMPTN	Pendaftar SBMPTN	Terima SBMPTN
Universitas cenderawasih	554	804	1774	392	1876	586
Universitas musamus merauke	445	1113	436	421	398	204
Isbi tanah papua	45	60	0	0	6	3
Universitas papua	558	744	423	246	296	172
Politeknik negeri fakfak	15	20	2	0	0	0
TOTAL	122.651	194.181	882.238	120.643	1.588.706	192.810

Tabel 12. Diversifikasi Layanan Non-Seleksi Perguruan Tinggi Negeri

No.	Mitra	Tahun	Bentuk Layanan	Tes yang Digunakan	Total Peserta	Total Anggaran
1	ITB	2020	Soal, aplikasi tes, dan skoring	TBS	500	71.400.000
		2021	Soal, aplikasi tes, dan skoring	TBS	500	71.400.000
		2022	Soal, aplikasi tes, dan skoring	TBS	503	71.400.000
2	CPNS- SKB Kemendikbudristek	2020	Konsultasi pengembangan instrumen, aplikasi bank soal, aplikasi tes, dan skoring		4.513	45.000.000
		2021	Konsultasi pengembangan instrumen, aplikasi bank soal, aplikasi tes, dan skoring		17.487	45.000.000
3	LPDP	2021	Soal, aplikasi tes, dan skoring	TBS	11.443	182.973.000
		2022	Soal, aplikasi tes, dan skoring	TBS, Tes Kepribadian	14.468	211.728.000
4	KSNK/OSNK	2021	Aplikasi bank soal dan aplikasi tes		151.356	77.962.000
		2022	Aplikasi bank soal dan aplikasi tes		230.607	68.712.000
5	PPPK- KemenpanRB	2021	Aplikasi bank soal dan aplikasi tes		604.502	45.000.000
6	PPG pra jabatan	2022	Aplikasi bank soal dan aplikasi tes	Literasi, Numerasi	32.546	45.000.000

Tabel 13. Evaluasi Kinerja Keuangan Periode 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019 (LTMPT)			TAHUN 2020 (LTMPT)			TAHUN 2021 (LTMPT)			TAHUN 2022 (LTMPT, BLN. JANUARI - AGUSTUS 2022)		TAHUN 2022 (BP3, BLN. OKTOBER - DESEMBER 2022)		
	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
PENDAPATAN														
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	188.212.200.000	188.212.200.000	-	94.469.100.000	94.469.100.000	-	226.253.027.032	226.253.027.032	-	142.131.293.753	142.131.293.753	-	-	-
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi														
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi														
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri														
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya														
JUMLAH PNBP	188.212.200.000	188.212.200.000	-	94.469.100.000	94.469.100.000	-	226.253.027.032	226.253.027.032	-	142.131.293.753	142.131.293.753	-	-	-
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)												10.000.000.000		
BELANJA (RUPIAH MURNI)														
Belanja Pegawai		-	-		-	-						487.857.000	214.993.188	272.863.812
Belanja Barang	100.000.000.000	90.695.037.728	9.304.962.272	40.000.000.000	39.999.951.200	48.800	40.000.000.000	40.000.000.000	-	45.000.000.000	44.585.200.000	9.512.143.000	8.707.090.453	805.052.547
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-						-	-	-
Belanja Modal Tanah												-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin														-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan														
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan														
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)														
Belanja Bantuan Sosial												-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	100.000.000.000	90.695.037.728	9.304.962.272	40.000.000.000	39.999.951.200	48.800	40.000.000.000	40.000.000.000	-	45.000.000.000	44.585.200.000	10.000.000.000	8.922.083.641	1.077.916.359
BELANJA (BLU)														
Belanja Pegawai														
Belanja Barang	195.732.509.762	173.438.155.312	22.299.354.450	123.436.767.803	123.436.767.803	-	146.366.716.730	146.366.716.730	-	142.131.293.753	142.131.293.753			-
Belanja Modal	39.200.000.000	39.200.000.000	-				63.477.221.600	63.477.221.600	-			-	-	-
Belanja Modal Tanah									-			-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.200.000.000	39.200.000.000					63.477.221.600	63.477.221.600	-					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan														
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan														
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)														
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)														
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)														
Belanja Bantuan Sosial												-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	234.932.509.762	212.638.155.312	22.299.354.450	123.436.767.803	123.436.767.803	-	209.843.938.330	209.843.938.330	-	142.131.293.753	142.131.293.753	-	-	-
TOTAL BELANJA	334.932.509.762	303.328.193.040	31.604.316.722	163.436.767.803	163.436.719.003	48.800	249.843.938.330	249.843.938.330	-	187.131.293.753	186.716.493.753	10.000.000.000	8.922.083.641	1.077.916.359

Tabel 14. Evaluasi SDM Tahun 2022

No.	Formasi	Status	Jumlah
1	Kepala BP3	ASN	1
2	Kepala Sub Bagian Umum	ASN	1
A	**Pokja Pengujian**		
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	1
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	2
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	ASN	0
B	**Pokja Data dan Evaluasi**		
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	0
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	0
3	Analis Data dan Informasi	Non ASN	0
4	Pengolah Data	ASN	1
5	Pengelola Bank Soal	ASN	0
C	**Pokja Kemitraan dan Unit Usaha**		
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	0
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	0
3	Analis Kemitraan	Non ASN	0
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	ASN	1
D	**Urusan Program dan Keuangan**		
1	Bendahara Penerimaan	ASN	1
2	Bendahara Pengeluaran	ASN	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	ASN	0
4	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	ASN	1
5	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	ASN	1
6	Pengelola Keuangan	ASN	1
7	Verifikator keuangan	ASN	1
8	Pengadministrasi Keuangan	ASN	1
E	**Urusan Kepegawaian**		
1	Pengadministrasi Umum	ASN	1
2	Pengelola Kepegawaian	ASN	1

F	**Urusan Rumah Tangga**		
1	Pengelola Barang Milik Negara	ASN	1
2	Teknisi Sarana Dan Prasarana	ASN	0
3	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	ASN dan Non ASN	1
4	Arsiparis Mahir	ASN	0
G	**Administrasi dan Keuangan**		
1	Pengelola Administrasi dan Keuangan	Non ASN	0
Total			18

Tabel 15. Estimasi Neraca Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2022 (BLN. JAN. - AGU. 2022 (LTMPT))	TAHUN 2022 (BLN OKT. - DES. 2022)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-	-	-
Kas BLU	-	-	12.778.000.000	21.541.566.283	29.464.325.379	27.617.152.527	26.325.326.173
Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)		-	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		-	-	-	-	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-	-	-	-	-
Persediaan		16.204.119	30.055.369	31.275.619	31.719.619	32.199.119	35.849.619
Jumlah Aset Lancar	-	**16.204.119**	**12.808.055.369**	**21.572.841.902**	**29.496.044.998**	**27.649.351.646**	**26.361.175.792**
ASET TETAP							
Tanah		-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin		604.316.134	829.316.134	1.065.566.134	2.507.473.134	4.556.975.134	7.362.390.384
Gedung dan Bangunan		-	-	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin		(343.386.929)	(427.596.507)	(553.354.476)	(959.142.081)	(1.770.989.960)	(3.142.730.918)
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan		-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	-	**260.929.205**	**401.719.627**	**512.211.658**	**1.548.331.053**	**2.785.985.174**	**4.219.659.466**
PIUTANG JANGKA PANJANG							
Piutang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA							
Aset Tidak Berwujud (Aplikasi)		-	-	14.100.000.000	21.150.000.000	24.675.000.000	26.437.500.000
Aset Lain-Lain		-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya		-	-	(1.762.500.000)	(6.168.750.000)	(11.808.750.000)	(18.021.562.500)
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	**12.337.500.000**	**14.981.250.000**	**12.866.250.000**	**8.415.937.500**
JUMLAH ASET	-	**277.133.324**	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Kepada Pihak Ketiga		-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-	-	-	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN		-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS							
Ekuitas	(324.737.043)	277.133.324	13.209.774.996	34.422.553.560	46.025.626.051	43.301.586.820	38.996.772.758
JUMLAH EKUITAS	**(324.737.043)**	**277.133.324**	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**(324.737.043)**	**277.133.324**	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**

Keterangan:

Aset tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Tabel 16. Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Komputer Unit	3100102003	307	Notebook	HP ELITE DRAGONFLYX360	2020	35.335.400
Komputer Unit	3100102003	229	Notebook	HP 240 G7	2019	15.750.000
Komputer Unit	3100102003	228	Notebook	HP 240 G7	2019	15.750.000
Komputer Unit	3100102003	337	Notebook	Asus A416JA-VIPS351 i3-1005G1	2021	9.933.000
Komputer Unit	3100102003	295	Notebook	Lenovo Thinkpad L390-6ID	2019	20.448.600
Komputer Unit	3100102003	335	Notebook	Asus A416JA-VIPS351 i3-1005G1	2021	9.933.000
Komputer Unit	3100102002	136	Laptop	ACER ASPIRE 5 A514 C I7-10510U	2020	16.319.600
Alat Kantor	3050105048	55	LCD Projector/Infocus	Epson EB 970	2018	11.170.000
Alat Kantor	3050105048	57	LCD Projector/Infocus	Epson EB 970	2018	11.170.000
Alat Kantor	3050105058	16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Brite Tripod 70inch [TRI-1818]	2018	1.200.000
Peralatan Komputer	3100203003	208	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro 200	2015	11.542.500
Peralatan Komputer	3100203003	239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP G3Q34A	2019	1.100.000
Peralatan Komputer	3100203003	240	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP G3Q34A	2019	1.100.000
Kendaraan	3100102003	9	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T	2022	228.000.000

B. Analisis SWOT

Tabel 17. Hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI)

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT		SKOR
KEKUATAN	a. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)				
	1	Pertumbuhan Pendapatan (PNBP) Cukup Tinggi	0,03	0,14	
	2	Pertumbuhan Aset Fisik Cukup Tinggi	0,02	0,04	
	3	Temuan Audit Eksternal Tidak Signifikan/Material	0,03	0,14	
	b. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)				

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT		SKOR
	1	satu satunya satker di bawah Kemendikbudristek yang memiliki tugas dan fungsi pengujian	0,03	0,11	
	2	melaksanakan pengujian skala nasional sejak Tahun 2003.	0,03	0,14	
	3	melakukan layanan pengujian dari instansi/Lembaga/kementerian lain.	0,03	0,14	
	4	memberikan jasa konsultasi dan peningkatan kompetensi untuk mendukung pengujian di tingkat daerah dan satuan Pendidikan.	0,02	0,04	
	5	memiliki aplikasi pengujian tingkat kelas yang digunakan secara masif di satuan pendidikan seluruh provinsi.	0,03	0,08	
	6	memiliki jejaring tenaga teknis pengujian berbasis komputer di 514 kab/kota, 34 provinsi.	0,02	0,07	
	7	memiliki kemitraan yang baik dengan PTN, Telkom, PLN, BSN, BRIN untuk melakukan validasi sistem pengujian berbasis komputer	0,02	0,04	
	8	memiliki SDM yang profesional untuk menyiapkan pengujian terstandar	0,02	0,07	
	9	didukung oleh sistem dan infrastruktur pengujian (server, perangkat lunak dan perangkat keras)	0,02	0,11	
	10	memiliki kemitraan yang baik dengan PTN dan Perguruan Tinggi Negeri dari Kementerian lainnya.	0,02	0,09	
	11	memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Baku (POB) yang dipahami setiap stakeholder seleksi penerimaan mahasiswa.	0,02	0,07	
	12	memiliki sumber pendapatan APBN dan pendapatan jasa layanan sebagai *resource* dalam pemberian layanan sesuai dengan tugas dan fungsi.	0,02	0,11	

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT		SKOR
	c. Perspektif Proses Bisnis Internal/*Internal Business Process Perspective*				
	●	Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Implementasi ISO 9001:2015	0,02	0,11	
	●	Renstra sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	0,03	0,14	
	●	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai (LAKIP) Sarana Pengukuran Kinerja Tahunan	0,03	0,14	
	●	Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Dialog *Stakeholder*, dan Kotak Saran Dikembangkan sebagai Sarana Komunikasi bagi Pengembangan BPPP	0,02	0,07	
	d. Perspektif Pertumbuhan (*Growth Perspective)*				
	●	Peningkatan Jumlah Peserta Seleksi	0,03	0,14	
	●	Peningkatan Jumlah Kerjasama Antar Lembaga	0,03	0,14	
	●	Pemanfaatan Hasil Pengujian	0,03	0,14	
KELEMAHAN	a. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)				
	●	keterbatasan dalam menentukan satuan biaya pengeluaran	0,02	0,07	
	●	keterbatasan dalam mengelola anggaran biaya antar tahun	0,02	0,05	
		kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan layanan pengujian	0,02	0,11	
		Efisiensi Penggunaan Dana	0,02	0,11	
		Dana Seleksi Terbatas	0,02	0,08	
	b. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)				
	1	Ketersediaan Komputer	0,03	0,14	

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT		SKOR
	2	Ketersediaan Server	0,03	0,14	
	3	Ketersediaan Jaringan Internet	0,03	0,14	
	4	Ketersediaan Listrik	0,03	0,14	
	5	Kualitas Layanan Administrasi	0,03	0,14	
	6	Kerjasama Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak antar lembaga	0,02	0,11	
	c. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process Perspective)*				
	1	Jumlah SDM yang Belum Memenuhi Kelompok Jabatan	0,02	0,11	
	d. Perspektif Pertumbuhan (*Growth Perspective)*				
	1	Peningkatan Kualifikasi Teknisi	0,02	0,11	
	2	Peningkatan Kualifikasi Proktor	0,02	0,11	
	3	Peningkatan Kualifikasi Pengawas	0,02	0,04	
	4	Hasil Penelitian Belum Termanfaatkan	0,02	0,11	
	5	Database dan Sistem Informasi Institusi yang Terintegrasi Belum Dikembangkan	0,02	0,11	
	6	SOP Layanan-layanan Belum Terimplementasi dengan Baik	0,02	0,11	
	7	Pemanfaatan Fasilitas Hasil Pengujian Rendah	0,02	0,11	
	8	Kemampuan Mengimbangi Kecepatan Perkembangan Teknologi Rendah	0,02	0,07	
Jumlah			1,00		4,34

Tabel 18. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT	SKOR
PELUANG	a. Politik			
	1	Perhatian yang Besar dari Pemerintah Pusat terhadap Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan secara Berkelanjutan	0,03	0,14
	2	Adanya perhatian dari pemerintah terhadap sistem seleksi yang transparan.	0,03	0,14
	3	Komitmen Pemenuhan Pendanaan Pendidikan Minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)	0,03	0,11
	4	Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan APK di Perguruan Tinggi	0,03	0,11
	b. Ekonomi			0,00
	1	kebutuhan pengujian yang akuntabel dan terjangkau secara ekonomi	0,03	0,11
	2	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Cukup Tinggi	0,03	0,11
	3	Stabilitas Nilai Tukar Rupiah	0,02	0,07
	4	Tingkat Inflasi Relatif Stabil	0,03	0,11
	c. Sosial			
	1	Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035 menciptakan peluang bagi BPPP mempersiapkan SDM terlatih	0,03	0,11
	d. Pendidikan			
	1	akses pengujian berkualitas terjangkau secara geografis	0,03	0,11
	2	melakukan pengujian yang sifatnya spesifik dan belum tersedia	0,03	0,11
	3	meningkatkan kapasitas pengujian di tingkat daerah – satuan pendidikan	0,03	0,11
	4	BPPP sebagai bagian dari Kemdikbud yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengujian yang tertuang di dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2020-2024	0,03	0,11

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT	SKOR
	5	Perluasan kesempatan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk Melanjutkan ke PTN	0,03	0,11
	6	Kebutuhan Masyarakat terhadap Pengembangan Pengujian	0,03	0,08
	e. Teknologi			
	1	Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Variasi Bisnis dan Pemanfaatannya dalam Pengujian Pendidikan	0,03	0,11
ANCAMAN	a. Politik			
	1	Perkembangan Politik Praktis yang Mengganggu Pencapaian Target-target Pembangunan	0,03	0,11
	2	Perubahan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan pengujian dan seleksi	0,02	0,09
	3	Penetapan besaran tarif UTBK-SBMPTN rawan terhadap tarik ulur kepentingan politik	0,02	0,09
	b. Ekonomi			
	1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Belum Memberikan Dampak Besar terhadap Perkembangan Sektor Riil sehingga Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan Lapangan Kerja	0,02	0,09
	2	Basis Kekuatan Ekonomi Indonesia yang Masih Mengandalkan Upah Tenaga Kerja yang Murah dan Ekspor Bahan Mentah dari Eksploitasi Sumber Daya Alam Tak Terbarukan;	0,02	0,07
	3	Ancaman Masuknya Tenaga Trampil Menengah dan Tenaga Ahli dari Negara- negara Lain	0,02	0,07
	4	Semakin Ketatnya (*rigid*) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Penggunaan Dana Pemerintah dalam Rangka Terwujudnya Peningkatan Kinerja, Keterbukaan/Transparansi, dan Akuntabilitas Satuan Kerja.	0,02	0,09
	c. Sosial			
	1	Jumlah Penduduk yang Makin Tinggi	0,02	0,05
	2	Dampak Negatif Globalisasi terhadap Nilai-nilai Sosial dan Budaya Asli Bangsa Indonesia	0,02	0,05

FAKTOR STRATEGIS			BOBOT	SKOR
	3	Besarnya Tuntutan terhadap Peningkatan Kualitas Hasil, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan	0,02	0,07
	d. Pendidikan			
	1	Disparitas sumber daya, pengelola pengujian diantara daerah Indonesia bagian barat dan timur.	0,02	0,07
	2	Variasi budaya, konteks, wawasan, dan tingkat kemampuan target pengujian memiliki potensi timbulnya bias pengukuran	0,02	0,07
	3	Komitmen untuk menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai- nilai Pancasila.	0,02	0,05
	4	Lembaga-lembaga Pengujian yang Belum Terstandar	0,02	0,07
	e. Teknologi			
	1	Kemajuan teknologi yang berlangsung cepat menuntut BPPP mengembangkan roadmap rencana strategis	0,02	0,07
	2	Infrastruktur (geografis) yang mendukung proses pengujian di wilayah tertinggal masih terkendala	0,02	0,07
	3	Sarana prasarana (akses jaringan) yang mendukung proses pengujian di wilayah tertinggal masih kurang	0,02	0,09
	4	Risiko keamanan data (kebocoran data dan instrumen seleksi)	0,02	0,04
Jumlah			0,82	3,01

C. Inisiatif Strategis

Tabel 19. Tujuan Strategis BPPP

No.	Tujuan Strategis UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
1	Melaksanakan tes kompetensi dan seleksi masuk perguruan tinggi dan seleksi lainnya yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel
2	Mewujudkan sistem pengelolaan pengujian (tes) yang akuntabel dan transparan.
3	Memberikan pengakuan terhadap kompetensi profesi tingkat nasional maupun internasional
4	Melakukan survei pendidikan atau sosial kemasyarakatan

No.	Tujuan Strategis UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
5	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengujian (tes) secara profesional
6	Mewujudkan jejaring kerjasama yang saling menguntungkan

Tabel 20. Sasaran Strategis BPPP

No.	Sasaran Strategis UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
1	Memperluas akses layanan pengujian Pendidikan
2	Meningkatkan Kualitas layanan pengujian Pendidikan
3	Meningkatkan kuantitas layanan pengujian Pendidikan
4	Meningkatkan relevansi dan keberdayagunaan data serta informasi hasil pengujian pendidikan
5	Mewujudkan tata kelola pendidikan

Tabel 21. Kegiatan Strategis BPPP

No.	Program Utama	Kegiatan Strategi Bisnis
1	Memperluas akses layanan pengujian pendidikan	• Menambah lokasi tempat pelaksanaan
		• Meningkatkan jumlah infrastruktur lokasi pengujian
		• Diversifikasi metode pengujian
		• Memberikan layanan afirmasi
2	Meningkatkan Kualitas layanan pengujian Pendidikan	• Meningkatkan akurasi hasil pengujian pendidikan
		• Meningkatkan ketepatan waktu pengelolaan hasil pengujian pendidikan
		• Meningkatkan kemampuan fasilitator pelaksanaan pengujian
		• Meningkatkan layanan sistem informasi mengenai mekanisme pengujian pendidikan
		• Meningkatkan layanan pengaduan
3	Meningkatkan kuantitas layanan pengujian Pendidikan	• Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru
		• Melakukan diversifikasi layanan pengujian pendidikan

No.	Program Utama	Kegiatan Strategi Bisnis
		• Sosialisasi serta promosi program layanan pengujian pendidikan
4	Meningkatkan relevansi dan keberdayagunaan informasi hasil pengujian pendidikan	• Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan hasil pengujian pendidikan
		• Melaksanakan workshop pemanfaatan hasil pengujian pendidikan
		• Menyusun sistem informasi hasil pengujian
		• Menyusun kajian relevansi informasi hasil pengujian pendidikan

Tabel 22. Jabaran Kegiatan Strategis BPPP

Agenda Pembangunan Nasional	Tujuan Kemendikbudristek	Visi BPPP	Misi BPPP	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Kerja
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	Unggul dalam Bidang Penguji an Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas	1. Melaksanakan pengujian (tes) yang kredibel untuk uji kompetensi dan seleksi. 2. Mengembangkan sistem pengelolaan pengujian (tes) yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. 3. Melakukan pengola	Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	Memperluas akses layanan pengujian pendidikan	Menambah lokasi tempat pelaksanaan
						Meningkatkan jumlah infrastruktur lokasi pengujian
						Diversifikasi metode pengujian
						Memberikan layanan afirmasi
					Meningkatkan Kualitas layanan pengujian Pendidikan	Meningkatkan akurasi hasil pengujian pendidikan
						Meningkatkan ketepatan waktu pengelolaan hasil pengujian pendidikan

Agenda Pembangunan Nasional	Tujuan Kemendikbudristek	Visi BPPP	Misi BPPP	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Kerja
			han, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian (tes) secara objektif. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengujian (tes) melalui pendidikan dan pelatihan. 5. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan			Meningkatkan kemampuan fasilitator pelaksanaan pengujian
						Meningkatkan layanan sistem informasi mengenai mekanisme pengujian pendidikan
						Meningkatkan layanan pengaduan
					Meningkatkan kuantitas layanan pengujian Pendidikan	Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru
						Melakukan diversifikasi layanan pengujian pendidikan
						Sosialisasi serta promosi program layanan pengujian pendidikan
					Meningkatkan relevansi dan keberdayagunaan informasi hasil pengujian pendidikan	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan hasil pengujian pendidikan
						Melaksanakan workshop pemanfaatan hasil pengujian pendidikan

Agenda Pembangunan Nasional	Tujuan Kemendikbudristek	Visi BPPP	Misi BPPP	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Kerja
						Menyusun sistem informasi hasil pengujian
						Menyusun kajian relevansi informasi hasil pengujian pendidikan
					Mewujudkan tata kelola pendidikan	Menyusun dan mengimplementasikan peta jalan reformasi birokrasi BPPP secara konsisten dan berkelanjutan
						Meningkatkan layanan sesuai dengan Standar Mutu (SPM, SPP,POS AP)
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip kinerja dan dikelola secara akuntabel
						Membentuk agen perubahan, pakta integritas, serta melaksanaka

Agenda Pembangunan Nasional	Tujuan Kemendikbudristek	Visi BPPP	Misi BPPP	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Kerja
						n agenda RBI BPPP secara konsisten dan berkelanjutan
						Konsolidasi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan indikator pada EKA dan IKPA
						Penguatan sistem pelaksanaan dan monitoring anggaran oleh SPI BPPP

LAMPIRAN II

A. Strategi Bisnis BPPP

Tabel 23. Memperluas Akses Layanan Pengujian Pendidikan

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Memperluas akses layanan pengujian pendidikan	Menambah lokasi tempat pelaksanaan	Jumlah lokasi tempat pelaksanaan pengujian pendidikan	74	74	100	125	150	150
		Persentase peserta yang mendapatkan layanan pengujian di lokasi domisili	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Meningkatkan jumlah infrastruktur lokasi pengujian	Jumlah komputer	75.000	77.500	85.000	92.500	105.000	105.000
		Jumlah server	3.750	3.875	4.250	4.625	5.250	5.250
	Diversifikasi metode pengujian	Jumlah metode pengujian	2	3	4	5	6	6
	Memberikan layanan afirmasi	Jumlah peserta pengujian dari sosial ekonomi lemah	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000
		Jumlah peserta berkebutuhan khusus	800	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000
		Jumlah peserta pengujian dari wilayah marginal	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000

Tabel 24. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengujian Pendidikan

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan Kualitas layanan pengujian Pendidikan	Meningkatkan akurasi hasil pengujian pendidikan	Kesesuaian jumlah peserta diterima dengan kuota yang tersedia (hasil seleksi yg valid)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
		Jumlah kajian validitas hasil pengujian	2	4	6	6	8	8
		Jumlah dokumen teknis penyusunan instrumen pengujian pendidikan	1	4	8	8	12	12
		Jumlah dokumen prosedur operasional baku dalam pengelolaan pengujian pendidikan	10	10	12	15	15	15
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pengujian pendidikan	4	78	110	135	160	160
	Meningkatkan ketepatan waktu pengelolaan hasil pengujian pendidikan	Jumlah aplikasi pengolah data yang dikembangkan	5	5	5	5	5	5
		Jumlah tenaga pengolah data yang dilatih	370	370	370	370	370	370
		Persentase pengolahan hasil pengujian pendidikan yang terlayani tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
	Meningkatkan kemampuan fasilitator	Jumlah proktor yang dilatih	500	500	500	500	500	500
		Jumlah teknisi yang dilatih	74	74	74	74	74	74

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	pelaksanaan pengujian	Jumlah pengawas yang dilatih	40.043	42000	43750	46000	475000	50000
	Meningkatkan layanan sistem informasi mengenai mekanisme pengujian pendidikan	Persentase pertanyaan mengenai penjelasan mekanisme yang mendapatkan respon/tanggapan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
		Jumlah webinar/seminar/sosialisasi mengenai penjelasan mekanisme pengujian	48	48	48	48	48	48
	Meningkatkan layanan pengaduan	Jumlah customer service yang terlatih	9	9	9	9	9	9
		Persentase pengaduan yang mendapatkan respon/tanggapan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

Tabel 25. Meningkatkan Kuantitas Layanan Pengujian Pendidikan

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan kuantitas layanan pengujian Pendidikan	Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru	Jumlah pendaftar tes penerimaan mahasiswa baru	800.852	840.000	875.000	920.000	950.000	1.000.000
	Melakukan diversifikasi layanan pengujian pendidikan	Jumlah peserta pengujian	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000
		Jumlah layanan pengujian	6	6	8	12	15	20
		Jumlah mitra pengujian pendidikan	4	4	5	7	9	10
	Sosialisasi serta promosi program layanan pengujian pendidikan	Jumlah sosialisasi dan promosi	48	48	48	48	48	48
		Jumlah mitra sosialisasi dan promosi	444	444	444	444	444	444

Tabel 26. Meningkatkan Relevansi dan Keberdayagunaan Data serta Informasi Hasil Pengujian Pendidikan

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan relevansi dan keberdayagunaan informasi hasil pengujian pendidikan	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan hasil pengujian pendidikan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	74	74	74	74	74	74
	Melaksanakan workshop pemanfaatan hasil pengujian pendidikan	Jumlah pelaksanaan workshop	74	74	74	74	74	74
		Jumlah peserta workshop	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	Menyusun sistem informasi hasil pengujian	Jumlah aplikasi pengolah informasi hasil pengujian	1	1	1	1	1	1
		Jumlah pemanfaat sistem informasi hasil pengujian	3	3	3	3	3	3
	Menyusun kajian relevansi informasi hasil pengujian pendidikan	Jumlah dokumen kajian	5	5	5	5	5	5

Tabel 27. Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan

Program Kerja	Kegiatan	Indikator	Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mewujudkan tata kelola pendidikan	Menyusun dan mengimplementasikan peta jalan reformasi birokrasi BPPP secara konsisten dan berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi BPPP	BB	A	A	A	A	A
	Meningkatkan layanan sesuai dengan Standar Mutu (SPM, SPP, POS AP)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan BPPP	B	A	A	A	A	A
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip kinerja dan dikelola secara akuntabel	Predikat Penilaian SAKIP	BB	A	A	A	A	A
	Membentuk agen perubahan, pakta integritas, serta melaksanakan agenda RBI BPPP secara konsisten dan berkelanjutan	Predikat Zona Integritas	ZI-WBK	ZI-WBK	ZI-WBK	ZI - WBBM	ZI - WBBM	ZI - WBBM
	Konsolidasi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan indikator pada EKA dan IKPA	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93	93	94	95	95	95
	Penguatan sistem pelaksanaan dan monitoring anggaran oleh SPI BPPP	Persentase tindak lanjut temuan hasil Audit BPK/Auditor yang diakui pemerintah	100	100	100	100	100	100
Optimalisasi Pemanfaatan Aset BMN sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan akuntabel	Pemanfaatan aset barang milik negara (BMN)	Jumlah Aset yang dioptimalkan						

B. Proyeksi Kuantitas Layanan yang Akan Dijalankan BPPP 5 Tahun ke Depan

Tabel 28. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						Outlook
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,0	5,13	5,0	5,1 – 5,4
Inflasi (%)	3,6	3,1	2,7	2,93	3,0	4,0 – 4,8
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5,0	5,0	5,6	5,40	7,3	6,85 – 8,42
Nilai Tukar (Rp/US$)	3.384	4.247	4.146	14.217	4.600	14500 - 14900

Tabel 29. Pertumbuhan Jumlah Pendaftar Ujian Seleksi Masuk PTN Periode 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
SBMPTN	**1.422.767**	**1.402.269**	**1.544.851**	**1.588.706**

C. Proyeksi Belanja 5 Tahun ke Depan

Tabel 30. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	108.000.000.000	108.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	100.000.000	100.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	775.000.000	775.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00%
JUMLAH PNBP	121.875.000.000	121.875.000.000	100,00%
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	200.000.000.000	-	
BELANJA (RUPIAH MURNI)	-	-	
Belanja Pegawai	3.972.000.000	3.971.851.000	100,00%
Belanja Barang	196.028.000.000	89.821.766.168	45,82%
Belanja Modal	-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	200.000.000.000	93.793.617.168	46,90%
BELANJA (BLU)	-	-	
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	108.872.000.000	108.872.000.000	100,00%
Belanja Modal	225.000.000	225.000.000	100,00%
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	225.000.000	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	109.097.000.000	109.097.000.000	100,00%
TOTAL BELANJA	309.097.000.000	202.890.617.168	65,64%

Tabel 31. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	113.000.000.000	113.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	150.000.000	150.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	850.000.000	850.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	6.375.000.000	6.375.000.000	100,00%
JUMLAH PNBP	128.375.000.000	128.375.000.000	100,00%
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	110.000.000.000	-	
BELANJA (RUPIAH MURNI)	-	-	
Belanja Pegawai	4.520.000.000	4.519.657.600	99,99%
Belanja Barang	105.480.000.000	101.928.010.760	96,63%
Belanja Modal	-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	110.000.000.000	106.447.668.360	96,77%
BELANJA (BLU)	-	-	
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	105.276.000.000	105.275.183.717	100,00%
Belanja Modal	14.336.250.000	14.336.250.000	100,00%
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.250.000	236.250.000	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	4.150.000.000	4.150.000.000	100,00%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	4.750.000.000	4.750.000.000	100,00%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	5.200.000.000	5.200.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	119.612.250.000	119.611.433.717	100,00%
TOTAL BELANJA	229.612.250.000	226.059.102.077	98,45%

Tabel 32. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	120.000.000.000	120.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	200.000.000	200.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	9.500.000.000	9.500.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	925.000.000	925.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	6.875.000.000	6.875.000.000	100,00%
JUMLAH PNBP	137.500.000.000	137.500.000.000	100,00%
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	105.000.000.000	-	
BELANJA (RUPIAH MURNI)	-	-	
Belanja Pegawai	5.043.000.000	5.042.783.500	100,00%
Belanja Barang	99.957.000.000	93.311.411.299	93,35%
Belanja Modal	-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	105.000.000.000	98.354.194.799	93,67%
BELANJA (BLU)	-	-	
Belanja Pegawai	996.000.000	995.280.000	99,93%
Belanja Barang	121.086.000.000	121.085.333.904	100,00%
Belanja Modal	8.491.907.000	8.491.907.000	100,00%
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.441.907.000	1.441.907.000	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	2.075.000.000	2.075.000.000	100,00%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	2.375.000.000	2.375.000.000	100,00%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	130.573.907.000	130.572.520.904	100,00%
TOTAL BELANJA	235.573.907.000	228.926.715.703	97,18%

Tabel 33. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2026

URAIAN	TAHUN 2026		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	124.000.000.000	124.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	250.000.000	250.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	1.075.000.000	1.075.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	7.375.000.000	7.375.000.000	100,00%
JUMLAH PNBP	143.700.000.000	143.700.000.000	100,00%
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	100.000.000.000	-	
BELANJA (RUPIAH MURNI)	-	-	
Belanja Pegawai	1.372.000.000	1.371.169.800	99,94%
Belanja Barang	98.628.000.000	98.597.700.724	99,97%
Belanja Modal	-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	100.000.000.000	99.968.870.524	99,97%
BELANJA (BLU)	-	-	
Belanja Pegawai	8.508.000.000	8.507.635.350	100,00%
Belanja Barang	131.466.000.000	131.465.035.502	100,00%
Belanja Modal	5.575.502.000	5.574.502.000	99,98%
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.049.502.000	2.049.502.000	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	1.038.000.000	1.037.500.000	99,95%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	1.188.000.000	1.187.500.000	99,96%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	145.549.502.000	145.547.172.852	100,00%
TOTAL BELANJA	245.549.502.000	245.516.043.376	99,99%

Tabel 34. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2027

URAIAN	TAHUN 2027		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	**132.000.000.000**	**132.000.000.000**	**100,00%**
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	**300.000.000**	**300.000.000**	**100,00%**
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	**13.000.000.000**	**13.000.000.000**	**100,00%**
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**100,00%**
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**100,00%**
JUMLAH PNBP	**154.500.000.000**	**154.500.000.000**	**100,00%**
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	**95.000.000.000**		
BELANJA (RUPIAH MURNI)			
Belanja Pegawai	**1.372.000.000**	**1.371.169.800**	**99,94%**
Belanja Barang	**93.628.000.000**	**92.968.726.467**	**99,30%**
Belanja Modal	-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)			
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	**95.000.000.000**	**94.339.896.267**	**99,31%**
BELANJA (BLU)			
Belanja Pegawai	**10.126.000.000**	**10.125.569.250**	**100,00%**
Belanja Barang	**141.099.000.000**	**141.098.341.854**	**100,00%**
Belanja Modal	**4.568.415.250**	**4.567.915.250**	**99,99%**
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.805.415.250	2.805.415.250	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	519.000.000	518.750.000	99,95%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	594.000.000	593.750.000	99,96%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	650.000.000	650.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	**155.793.415.250**	**155.791.826.354**	**100,00%**
TOTAL BELANJA	**250.793.415.250**	**250.131.722.621**	**99,74%**

Tabel 35. Rekap Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023-2027

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026			TAHUN 2027		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN															
PNBP BP3 Seleksi Mahasiswa	106.000.000.000	106.000.000.000	100,00%	113.000.000.000	113.000.000.000	100,00%	120.000.000.000	120.000.000.000	100,00%	124.000.000.000	124.000.000.000	100,00%	132.000.000.000	132.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Bidang Studi	100.000.000	100.000.000	100,00%	150.000.000	150.000.000	100,00%	200.000.000	200.000.000	100,00%	250.000.000	250.000.000	100,00%	300.000.000	300.000.000	100,00%
PNBP BP3 Akademik Literasi Numerasi	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%	9.500.000.000	9.500.000.000	100,00%	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00%	13.000.000.000	13.000.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Potensi Diri	775.000.000	775.000.000	100,00%	850.000.000	850.000.000	100,00%	925.000.000	925.000.000	100,00%	1.075.000.000	1.075.000.000	100,00%	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%
PNBP BP3 Non Akademik Lainnya	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00%	6.375.000.000	6.375.000.000	100,00%	6.875.000.000	6.875.000.000	100,00%	7.375.000.000	7.375.000.000	100,00%	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%
JUMLAH PNBP	121.875.000.000	121.875.000.000	100,00%	128.375.000.000	128.375.000.000	100,00%	137.500.000.000	137.500.000.000	100,00%	143.700.000.000	143.700.000.000	100,00%	154.500.000.000	154.500.000.000	100,00%
PENERIMAAN DIPA (RUPIAH MURNI)	200.000.000.000	-		110.000.000.000			105.000.000.000	-		100.000.000.000	-		93.628.000.000		
BELANJA (RUPIAH MURNI)	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Pegawai	3.972.000.000	3.971.851.000	100,00%	4.520.000.000	4.519.657.600	99,99%	5.043.000.000	5.042.783.500	100,00%	1.372.000.000	1.371.169.800	99,94%	1.372.000.000	1.371.169.800	99,94%
Belanja Barang	196.028.000.000	89.821.766.168	45,82%	105.480.000.000	101.928.010.760	96,63%	99.957.000.000	93.311.411.299	93,35%	98.628.000.000	98.597.700.724	99,97%	93.628.000.000	92.968.726.467	99,30%
Belanja Modal	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Tanah	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
JUMLAH BELANJA (RUPIAH MURNI)	200.000.000.000	93.793.617.168	46,90%	110.000.000.000	106.447.668.360	96,77%	105.000.000.000	98.354.194.799	93,67%	100.000.000.000	99.968.870.524	99,97%	93.628.000.000	94.339.896.267	100,76%
BELANJA (BLU)	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Pegawai	-	-		-	-		996.000.000	995.280.000	99,93%	8.508.000.000	8.507.635.350	100,00%	10.126.000.000	10.125.569.250	100,00%
Belanja Barang	108.872.000.000	108.872.000.000	100,00%	105.276.000.000	105.275.183.717	100,00%	121.086.000.000	121.085.333.804	100,00%	131.466.000.000	131.465.035.502	100,00%	141.099.000.000	141.098.341.854	100,00%
Belanja Modal	225.000.000	225.000.000	100,00%	14.336.250.000	14.336.250.000	100,00%	8.491.907.000	8.491.907.000	100,00%	5.575.502.000	5.574.502.000	99,98%	4.568.415.250	4.567.915.250	99,99%
Belanja Modal Tanah	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	225.000.000	100,00%	236.250.000	236.250.000	100,00%	1.441.907.000	1.441.907.000	100,00%	2.049.502.000	2.049.502.000	100,00%	2.805.415.250	2.805.415.250	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Registrasi)	-	-		4.150.000.000	4.150.000.000	100,00%	2.075.000.000	2.075.000.000	100,00%	1.038.000.000	1.037.500.000	99,95%	519.000.000	518.750.000	99,95%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Implementasi)	-	-		4.750.000.000	4.750.000.000	100,00%	2.375.000.000	2.375.000.000	100,00%	1.188.000.000	1.187.500.000	99,96%	594.000.000	593.750.000	99,96%
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Aplikasi Pembelajaran)	-	-		5.200.000.000	5.200.000.000	100,00%	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00%	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00%	650.000.000	650.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
JUMLAH BELANJA (BLU)	109.097.000.000	109.097.000.000	100,00%	119.612.250.000	119.611.433.717	100,00%	130.573.907.000	130.572.520.804	100,00%	145.549.502.000	145.547.172.852	100,00%	155.793.415.250	155.791.826.354	100,00%
TOTAL BELANJA	309.097.000.000	202.890.617.168	65,64%	229.612.250.000	226.059.102.077	98,45%	235.573.907.000	228.926.715.603	97,18%	245.549.502.000	245.516.043.376	99,99%	249.421.415.250	250.131.722.621	100,28%

Tabel 36.

Tabel 36. Estimasi Laporan Operasional Anggaran 5 Tahun Periode 2023-2027

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU	**121.875.000.000**	**128.375.000.000**	**137.500.000.000**	**143.700.000.000**	**154.500.000.000**
Seleksi Mahasiswa	108.000.000.000	113.000.000.000	120.000.000.000	124.000.000.000	132.000.000.000
Akademik Bidang Studi	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
Akademik Literasi Numerasi	7.000.000.000	8.000.000.000	9.500.000.000	11.000.000.000	13.000.000.000
Non Akademik Potensi Diri	775.000.000	850.000.000	925.000.000	1.075.000.000	1.200.000.000
Non Akademik Lainnya	6.000.000.000	6.375.000.000	6.875.000.000	7.375.000.000	8.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**121.875.000.000**	**128.375.000.000**	**137.500.000.000**	**143.700.000.000**	**154.500.000.000**
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	3.971.851.000	4.519.657.600	5.042.783.500	9.878.805.150	11.496.739.050
Beban Persediaan	26.115.000	28.671.750	31.233.000	32.785.500	30.549.500
Beban Barang dan Jasa	198.653.799.918	207.173.302.477	214.365.068.203	230.029.471.226	234.032.868.321
Beban Pemeliharaan	-	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	84.209.578	1.888.257.969	4.812.037.605	6.451.847.879	7.584.553.458
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**202.735.975.496**	**213.609.889.796**	**224.251.122.308**	**246.392.909.755**	**253.144.710.329**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(80.860.975.496)**	**(85.234.889.796)**	**(86.751.122.308)**	**(102.692.909.755)**	**(98.644.710.329)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(80.860.975.496)**	**(85.234.889.796)**	**(86.751.122.308)**	**(102.692.909.755)**	**(98.644.710.329)**
POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/DEFISIT LO	**(80.860.975.496)**	**(85.234.889.796)**	**(86.751.122.308)**	**(102.692.909.755)**	**(98.644.710.329)**

Tabel 37. Estimasi Neraca 5 Tahun Periode 2023-2027

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-
Kas BLU	12.778.000.000	21.541.566.283	29.464.325.379	27.617.152.527	26.325.326.173
Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)	-	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	-	-	-	-	-
Persediaan	30.055.369	31.275.619	31.719.619	32.199.119	35.849.619
Jumlah Aset Lancar	**12.808.055.369**	**21.572.841.902**	**29.496.044.998**	**27.649.351.646**	**26.361.175.792**
ASET TETAP					
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	829.316.134	1.065.566.134	2.507.473.134	4.556.975.134	7.362.390.384
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(427.596.507)	(553.354.476)	(959.142.081)	(1.770.989.960)	(3.142.730.918)
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	**401.719.627**	**512.211.658**	**1.548.331.053**	**2.785.985.174**	**4.219.659.466**
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud (Aplikasi)	-	14.100.000.000	21.150.000.000	24.675.000.000	26.437.500.000
Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	-	(1.762.500.000)	(6.168.750.000)	(11.808.750.000)	(18.021.562.500)
Jumlah Aset Lainnya	-	**12.337.500.000**	**14.981.250.000**	**12.866.250.000**	**8.415.937.500**
JUMLAH ASET	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-	-	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-	-	-
EKUITAS					
Ekuitas	13.209.774.996	34.422.553.560	46.025.626.051	43.301.586.820	38.996.772.758
JUMLAH EKUITAS	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**13.209.774.996**	**34.422.553.560**	**46.025.626.051**	**43.301.586.820**	**38.996.772.758**

D. Proyeksi SDM 5 Tahun ke Depan

Tabel 38. Proyeksi SDM 5 Tahun Periode 2023-2027

No.	Formasi	Status	2022 Eksisting)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kepala BPPP	ASN	1	1	1	1	1	1
2	Kepala Subbagian Umum	ASN	1	1	1	1	1	1
Kelompok Kerja								
A	**Pokja Pengujian**							
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	1	3	4	5	6	7
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	2	4	5	6	7	7
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	ASN	-	1	1	1	1	2
	Staf Unit Layanan Pengujian	Non-ASN	-	-	-	15	30	45
B	**Pokja Data dan Evaluasi**							
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	-	2	4	5	5	5
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	-	3	4	5	5	6
3	Analis Data dan Informasi	Non-ASN	-	2	2	2	2	2
4	Pengolah Data	ASN	1	2	2	2	2	2
5	Pengelola Bank Soal	ASN	-	2	2	2	2	2
C	**Pokja Kemitraan dan Unit Usaha Bisnis**							
1	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	ASN	-	1	2	2	2	3
2	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama	ASN	-	1	1	1	1	2
3	Analis Kemitraan	Non-ASN	-	2	3	3	3	4
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	ASN	1	1	1	2	2	2
	Pokja Administrasi dan Keuangan							
	Bendahara Penerimaan	ASN	1	1	1	1	1	1
	Bendahara Pengeluaran	ASN	1	1	1	1	1	1
	Pengelola Keuangan	ASN	1	1	1	1	1	1
	Verifikator keuangan	ASN	1	2	2	2	2	2
	Pengadministrasi Keuangan	ASN	1	3	4	4	4	5
	Pengelola Administrasi dan Keuangan	Non-ASN	-	-	-	3	3	3
Subbagian Umum								
	Urusan Program dan Keuangan							
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	ASN	-	1	1	1	1	1
2	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	ASN	1	1	1	1	1	1
3	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	ASN	1	1	1	1	1	1
	Urusan Kepegawaian							
1	Pengadministrasi Umum	ASN	1	2	2	2	2	2
2	Pengelola Kepegawaian	ASN	1	1	1	1	1	1
	Urusan Rumah Tangga							

No.	Formasi	Status	2022 Eksisting)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pengelola Barang Milik Negara	ASN	1	1	1	1	1	1
2	Teknisi Sarana dan Prasarana	ASN	-	1	1	1	1	1
3	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	ASN dan Non-ASN	1	1	2	2	2	2
4	Arsiparis Mahir	ASN	-	1	1	1	1	1
Proyeksi Kebutuhan SDM Per Tahun			**18**	**44**	**53**	**76**	**93**	**115**

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN